

LAPORAN PENELITIAN



**PEMETAAN GURU SMPN, SMAN KOTA
BANJARMASIN**



KERJASAMA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA BANJARMASIN

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2012

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul Usulan : Pemetaan Guru SMP, SMA Kota Banjarmasin

2. Ketua Peneliti

- a. Nama lengkap : Dr. H. Sarbaini, M.Pd.
- b. Bidang keahlian : Pendidikan Kewarganegaraan
- c. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc
- d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e. Unit kerja : FKIP Universitas Lambung Mangkurat
- f. Alamat surat : Jalan Brigjend H. Hassan Basry Kotak Pos 87 Banjarmasin
- g. Telpon/Faks : 0511-3304914
- h. E-mail : sarbainiunlambjm292@gmail.com

3. Anggota peneliti

No.	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi
1	Nasruddin, S.Pd, M.Sc.	Pendidikan Geografi	Universitas Lambung Mangkurat
2	Dra. H. Fatimah, M.Hum	Humaniora	Universitas Lambung Mangkurat
3	Mariatul Kiftiah, S.Pd, M.Pd	Pendidikan	Universitas Lambung Mangkurat
4	Syahlan Mattiro,SH.,M.Si.	Pendidikan Sosiologi	Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin, Oktober 2012

Ketua Lembaga Penelitian



DR. AHMAD ALIM BACHRI, SE.,M.Si.
NIP. 19671231 1995121 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Allamin, Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Ridha, Nikmat dan Karunia yang dilimpahkan atas kesehatan dan kemampuan yang tim peneliti. Salawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan seluruh umat Muslimin, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan penegak Sunnah beliau sampai akhir zaman. Tim peneliti telah berhasil menyelesaikan buku laporan penelitian tentang Pemetaan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Banjarmasin. Buku laporan penelitian tentang Pemetaan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Kota Banjarmasin adalah hasil kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Banjarmasin dengan Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat.

Buku laporan penelitian ini secara substansif berisi tentang peta posisi jumlah guru secara umum; jumlah guru mata pelajaran; jumlah guru mata pelajaran yang lebih; jumlah guru mata pelajaran yang kurang; jumlah kebutuhan guru secara umum dan jumlah kebutuhan guru secara nyata serta jumlah guru perlu dilakukan penataan dan redistribusi; aspirasi terhadap kebijakan penataan dan redistribusi guru yang jumlahnya lebih dan kurang, dan rekomendasi kebijakan.

Apapun materi yang dipublikasikan dalam buku laporan penelitian ini disadari akan ditemukan kelemahan dan kekurangan, untuk itu saran konstruktif akan diterima dengan lapang dada dan hati terbuka, untuk perbaikan dan penyempurnaan kerja dan publikasi di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian sampai kepada bentuk buku laporan ini, disampaikan terima kasih sebesar-besarnya, semoga Allah memberikan pahala yang tidak terhingga, dan publikasi dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Banjarmasin, September 2012

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKAN	7
A. Upaya Perbaikan Mutu Pendidikan	7
B. Keberadaan Guru dan Mutu Pendidikan	8
C. Peraturan Bersama Lima Menteri	13
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	16
B. Tipe dan Jenis Penelitian	17
C. Populasi dan Sampling	15
D. Sumber dan Jenis Data.....	17
E. Teknik pengumpulan Data	18
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	19
G. Jadwal Penelitian	20
H. Biaya Penelitian	20
I. Pelaksana Penelitian	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Daerah Penelitian.....	
1. Lokasi	22
2. Topografi	25
3. Penggunaan Lahan	25
4. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	26
B. Hasil Penelitian	
1. Posisi Jumlah Guru SMPN dan SMAN Kota Banjarmasin	27
a. Perspektif Umum	27
b. Jumlah Guru Mata Pelajaran SMP Negeri dan SMA Negeri.....	41
2. Jumlah Kebutuhan, Kelebihan dan Kekurangan Guru Mata pelajaran SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin.....	42
a. Guru Mata Pelajaran SMP Negeri Kota Banjarmasin.....	42
b. Guru Mata Pelajaran SMA negeri Kota Banjarmasin	46
3. Selisih Jumlah dan Tindakan Nyata untuk Guru SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin	50
a. Guru Mata Pelajaran SMP Negeri Kota Banjarmasin.....	50
b. Guru Mata Pelajaran SMA negeri Kota Banjarmasin	51

4. Aspirasi Terhadap Penataan dan Restribusi Guru SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarsin	52
C. Pembahasan	
1. Posisi Jumlah Guru SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin	55
2. Kelebihan, Kekurangan, Kebutuhan dan Tindakan untuk Guru SMPN dan SMAN Kota Banjarmasin yang Jumlahnya Kelebihan dan Kekurangan.	59
3. Aspirasi Terhadap Kebijakan Penataan dan Restribusi Guru yang Jumlahnya Kelebihan dan Kekurangan dari Kebutuhan di SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin	63
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Rekomendasi Kebijakan	73

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel No.

Halaman

1	Luas Wilayah Kota Banjarmasin menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin	23
2	Distribusi Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Banjarmasin	26
3	Jumlah Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Gender dan Wilayah Kecamatan	27
4	Pendidikan Tertinggi Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan	28
5	Golongan Pangkat Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan	29
6	Umur Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan	30
7	Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran Pokok yang Diajar oleh Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin	32
8	Jumlah Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Gender dan Wilayah Kecamatan	33
9	Pendidikan Tertinggi Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan	34
10	Golongan Pangkat Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan	35
11	Umur Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan	36
12	Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran Pokok yang Diajar oleh Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin	38
13	Jumlah Guru Mata Pelajaran SMP Negeri Kota Banjarmasin	39
14	Jumlah Guru Mata Pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin	41
15	Jumlah Kebutuhan, Kelebihan dan Kekurangan Guru Materi Pelajaran SMP Negeri Kota Banjarmasin	42
16	Jumlah Kebutuhan, Kelebihan dan Kekurangan Guru Materi Pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin	46
17	Selisih Jumlah dan Tindakan Nyata untuk Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin	50
18	Selisih Jumlah dan Tindakan Nyata untuk Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang pada gilirannya mampu meningkatkan martabat dirinya dan profesinya. Guru profesional dan bermartabat akan melahirkan anak-anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain itu Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga diharapkan memiliki dampak yang sangat besar untuk dunia pendidikan Indonesia. Sasaran utamanya adalah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dibangun dari berbagai aspek,. Guru adalah salah satu faktor yang menentukan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas tersebut. Karena guru adalah bagian yang tak terpisahkan dari komponen pendidikan lainnya yaitu peserta didik, kurikulum/program pendidikan, fasilitas, dan manajemen. Namun kualitas pendidikan amat dipengaruhi oleh kualitas guru (Murphy: 1992; Wong,1996, dalam Maulana, 2011) . Diduga salah satu faktor guru yang menyebabkan rendahnya mutu lulusan adalah rendahnya kompetensi guru (Blazely, dkk, dalam Reece and Stephen, 1997)

Masalahnya pendidikan di Indonesia selain rendahnya kompetensi, juga masih ditemukan adanya beberapa guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang ditetapkan, yakni harus berijazah S1 maupun mengajar tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya, serta penyebaran guru yang tidak merata di sekolah-sekolah. Hal demikian berkaitan dengan kegiatan perencanaan guru.

Perencanaan guru hendaknya berbasis pada jenis jurusan atau program keahlian, dan jumlah rombongan belajar yang dibuka di sekolah. Terpenuhi atau tidaknya beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu bagi jenis guru tertentu sebenarnya sudah dapat dideteksi pada saat jumlah guru yang dibutuhkan sudah dihitung. Sebagai contoh, apabila jumlah guru menurut hitungan dibutuhkan 2,25 orang dan disediakan sebanyak 2 orang saja, maka beban mengajar kedua guru tersebut masing-masing sudah 28 jam per minggu. Apabila dibutuhkan 2,5 orang guru dan tersedia 3 orang, maka salah satu guru tersebut tidak memenuhi jam tatap muka minimal 24 jam.

Data tahun 2003 menunjukkan bahwa rasio guru terhadap siswa sudah ideal, sebagai contoh pada jenjang SD 1:21, SMP 1:17, dan SMA 1:14 (Ditjen PMPTK Depdiknas; 2008). Namun apabila dilihat secara detail pada jenis guru tertentu di beberapa daerah dilaporkan terdapat kekurangan guru atau kelebihan guru. Kondisi sekolah yang memiliki kelebihan guru akan menyebabkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam per minggu. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi

dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perencanaan guru di sekolah belum baik.

Penyebaran guru yang tidak merata menimbulkan terjadinya pendayagunaan guru yang tidak efisien di beberapa tempat. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam tatap muka per minggu disarankan untuk mutasi/pindah ke sekolah lain yang kekurangan guru. Pengaturan tentang pemindahan guru mengikuti kebijakan masing-masing pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.

Program mutasi bagi guru-guru di semua sekolah yang ada di dalam satu Kabupaten/Kota sudah seharusnya dilakukan, karena dapat menjadi salah satu solusi pemenuhan beban kerja guru dan menumpuknya guru di sekolah perkotaan. Sekolah yang kekurangan guru akan mendapat tambahan guru dari sekolah lain. Begitu pun sekolah yang kelebihan guru, nanti akan dilihat guru mata pelajaran mana saja yang kira-kira bisa dikurangi untuk dipindahkan ke sekolah yang kekurangan. Guru-guru yang menjelang pensiun dalam jangka dua atau tiga tahun ke depan perlu mendapat perhatian, karena jika di satu sekolah ada guru yang pensiun, maka akan ada guru yang dirotasi karena akan menggantikan guru yang pensiun.

Agar kegiatan peningkatan mutu pendidikan, khusus peningkatan mutu pendidikan disekolah berjalan lancar, terutama yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pemenuhan kebutuhan dan penyebaran guru di sekolah, maka diperlukan kegiatan pemetaan guru. Hal demikian sejalan dengan Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh (2011) yang mengatakan, hasil pemetaan

terhadap kebutuhan guru di Tanah Air bila dihitung secara normal hingga tahun 2014 sebanyak 300 ribu guru lebih. Selanjutnya ditambahkan, namun demikian, kebutuhan guru yang jumlahnya cukup besar itu, bisa menjadi lebih efisien dan dikurangi, bila diatur dari sekarang dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

B. Permasalahan

Dalam kenyataan di lapangan nampaknya masih terdapat pada beberapa di sekolah di Kota Banjarmasin, jumlah gurunya menunjukkan kelebihan, tapi pada sisi lainnya terdapat kekurangan, khususnya pada mata-mata pelajaran tertentu. Keadaan demikian kelihatannya masih belum didata secara sistematis dan akurat sebagai bagian dari input untuk perencanaan penentuan kebutuhan, penempatan dan mutasi guru.

Karena kondisi sekolah yang memiliki kelebihan guru akan menyebabkan guru tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam per minggu. Sementara sekolah yang kekurangan guru akan menyebabkan beban kerja guru menjadi lebih tinggi dan proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Penyebaran guru yang tidak merata menimbulkan terjadinya pendayagunaan guru yang tidak efisien di beberapa tempat. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam tatap muka per minggu disarankan untuk mutasi/pindah ke sekolah lain yang kekurangan guru. Namun program mutasi yang dilakukan hendaknya didasarkan pada data yang akurat tentang posisi guru mata pelajaran di sekolah yang jumlah kelebihan maupun kekurangan.

Sampai saat ini penelitian terhadap guru di Kota Banjarmasin yang telah dilakukan adalah tentang Relevansi Bidang Keahlian Guru terhadap Mata Pelajaran yang Diasuh pada SLTP (2007) dan tentang Jumlah dan Kemampuan Guru yang Tidak Relevan antara Kompetensi Keilmuan dengan Mata Pelajaran yang Diasuh pada SMAN dan SMKN (2008). Penelitian-penelitian tersebut belum menggambarkan posisi guru SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin, dari jumlah baik secara keseluruhan, maupun kelebihan dan kekurangan dilihat dari guru mata pelajaran.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana sebenarnya posisi jumlah guru SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin, baik dilihat dari kelebihan, kekurangan dan kebutuhan guru mata pelajaran, selisih jumlah dan tindakan nyata maupun aspirasi terhadap tindakan penambahan dan redistribusi guru.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui posisi jumlah guru SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui jumlah kelebihan, kekurangan dan kebutuhan guru mata pelajaran SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin dilihat dari materi pelajaran
3. Untuk mengetahui selisih jumlah dan tindakan nyata maupun aspirasi terhadap tindakan penambahan dan redistribusi guru SMPN dan SMAN dilihat dari materi pelajaran

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Diperolehnya data posisi sebenarnya tentang jumlah guru SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin
2. Diketuinya posisi jumlah kelebihan, kekurangan dan kebutuhan guru mata pelajaran di SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin
4. Diketuinya posisi guru selisih jumlah dan tindakan nyata maupun aspirasi terhadap tindakan penambahan dan redistribusi guru materi pelajaran SMPN dan SMAN Kota Banjarmasin
3. Dapat dijadikan data dasar untuk membuat perencanaan guru dari aspek pemenuhan kebutuhan dan penyebaran guru mata pelajaran secara merata di SMPN dan SMAN Kota Banjarmasin

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Perbaikan Mutu Pendidikan

Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh semua pihak, untuk menuju perbaikan mutu pendidikan. Upaya tersebut antara lain, dengan dikeluarkannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 28 tahun 1990, Kurikulum 1994 Suplemen 1999, Sistem Pembinaan Profesional Guru, UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Kepmendiknas No. 044/U/2002 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dan Program Wajib Belajar 9 tahun dengan sasaran semua anak usia 7 hingga 15 tahun, untuk mengikuti pendidikan 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah lanjutan pertama. Kini disusul lagi dengan munculnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Dari berbagai upaya yang sudah dilakukan, mutu pendidikan khususnya di tingkat SMP negeri/swasta berdasarkan data nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2002/2003 menunjukkan bahwa rerata UAN untuk seluruh mata pelajaran secara nasional relatif cukup tinggi, yaitu 5,93 (Ditjen Dikdasmen, 2004). Tingkat pencapaian ini dapat ditafsirkan bahwa secara rerata, lulusan SMP menguasai 59,30% dari seluruh materi yang seharusnya dikuasai, namun demikian untuk daerah Kalimantan Selatan, rerata nilai UAN SMP menunjukkan angka rerata di bawah rerata nilai UAN Nasional, yakni hanya 5,56 (Pusijian Depdiknas, September 2003). Meskipun pencapaian rerata UAN SMP di Kalimantan Selatan

masih di bawah rerata nilai UAN SMP secara nasional, namun rerata nilai UAN SMP di Kalimantan Selatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat (Sarbaini, 2005).

Meskipun data-data dari hasil Ujian Nasional cenderung menunjukkan kenaikan, namun fenomena di lapangan masih menunjukkan adanya masalah, tidak hanya pada sistem evaluasi dan kurikulum, tetapi juga pada melainkan terletak pada rendahnya kualitas guru secara umum dan tidak meratanya persebaran guru-guru profesional (Abdul Faqih, 2007), atau Bagaimana Mutu Lulusan yang Diharapkan, Begitulah Mutu Gurunya ? (<http://gurupembaharu.com>, 2009), sumber daya manusia yang belum profesional (Tilaar, dalam Mulyasa, 2008), rendahnya kinerja guru (Muhajir, 2011), dan rendahnya kompetensi guru (Sekretaris Badan Nasional Standar Pendidikan, Kedaulatan Rakyat, 1-8-2006).

B. Keberadaan Guru dan Mutu Pendidikan

Guru seharusnya memiliki peran dan tanggungjawab yang sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Jika ada tuntutan bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya, hal itu terutama dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, dan pada gilirannya untuk membuat bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pernyataan tersebut mengisyaratkan tanggungjawab dari para guru yang sudah sejak lama berada digaris depan pendidikan.

Di samping itu, guru juga adalah salah satu, bahkan faktor yang dapat dikatakan amat menentukan untuk mencapai tujuan peningkatan kualitas

pendidikan (Simola, 2005). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pelayanan pendidikan yang bermutu. Demikian juga UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru pun yang semula adalah jabatan, melalui Undang-undang ini ditingkatkan menjadi Profesi, artinya seseorang belum bisa dinyatakan sebagai guru jika belum memenuhi beberapa persyaratan syarat-syarat tersebut adalah ; Guru wajib memiliki; Kualifikasi akademik, Kompetensi, Sertifikat pendidik, Sehat jasmani & rohani, dan Kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Hal tersebut diperkuat juga oleh pemerintah Indonesia dengan menetapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Kompetensi guru meliputi empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi pedagogik meliputi 10 kompetensi inti, kompetensi kepribadian meliputi 5 kompetensi inti, kompetensi sosial meliputi 4 kompetensi inti, dan kompetensi profesional meliputi 5 kompetensi inti. Dengan demikian guru Indonesia wajib memenuhi 24 indikator inti pada melaksanakan tugas sebagai guru.

Namun demikian kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya hal-hal yang memprihatinkan, sehubungan dengan kualitas dan kompetensi guru. Sekretaris Badan Nasional Standar Pendidikan (2006). di hadapan peserta Konferensi Nasional Matematika XIII dan Kongres Himpunan Matematika Indonesia di Unnes Semarang beberapa waktu lalu. Betapa tidak, ternyata jumlah

guru SD se-Indonesia yang tidak layak mengajar mencapai 609.217 orang atau sekitar 49,3 % dari tenaga pendidik yang ada di Indonesia (KR, 1-8-2006). Bahkan lebih kaget lagi, berdasarkan hasil latihan uji kompetensi terhadap 30.000 guru SD, MI, , SMP, MTs, SMA, MA dan SMK pada tahun 2004, ternyata Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita kenal sebagai kota pendidikan dan barometernya pendidikan di Indonesia, ada 60 % guru yang nilainya kurang dari 7, atau dengan kata lain tidak layak mengajar.

Selain itu Menurut laporan Balitbang Depdiknas, misalnya, hanya sekitar 30 persen dari keseluruhan guru tingkat SD di Indonesia yang mempunyai kualifikasi untuk mengajar. Hal yang sama juga terjadi di satuan pendidikan menengah, terutama di lingkungan madrasah. Data Departemen Agama (2006) menyebutkan bahwa sekitar 60 persen guru madrasah tidak mempunyai kualifikasi mengajar.

Terkait dengan kebijakan perubahan kurikulum, penting dicatat bahwa inovasi kurikulum tanpa didukung oleh ketersediaan guru yang mumpuni –yang notabene sebagai agen pelaksana kurikulum di kelas– malah hanya akan semakin membuat runyam mutu pendidikan. Padahal faktor inovasi kurikulum, sebagaimana dikatakan Simola (2005), tidak berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan pendidikan di Finlandia. Ketersediaan guru yang kompetenlah sebenarnya yang merupakan kunci sukses pendidikan di negara tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, terutama kualitas pendidikan di sekolah adalah :

1. Perlunya dilakukan semacam ‘ujian nasional’ bagi semua guru dari tingkat SD sampai SMA. ‘UN’ guru ini digunakan sebagai langkah pemetaan terhadap kompetensi guru secara nasional. Program ini juga penting sebagai upaya melihat sejauhmana persebaran guru-guru yang benar-benar kompeten di bidangnya.
2. Kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru sebagai implementasi UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen sesungguhnya bisa diarahkan pada tujuan di atas. Namun sayangnya, kebijakan tersebut terkesan terlalu akomodatif terhadap tarik ulur kepentingan politis. Semestinya kebijakan tersebut harus benar-benar diarahkan pada upaya menjaring bibit-bibit guru profesional, bukan sekedar untuk ‘balas budi’ terhadap lamanya pengabdian para ‘guru senior’.
3. Perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Selama ini guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (*effective schools*) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan –baik dari sisi ekonomi maupun karier– yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Hal inilah sebenarnya yang melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antara *urban schools* dengan *rural schools*. Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di daerah terpencil berupa kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan daya tarik yang lebih kepada mereka yang mengajar di sekolah-sekolah pinggiran tersebut, misalnya, dengan ditambahkannya insentif perumahan dan

fasilitas pendukung lainnya. Pola pembinaan karir terutama guru-guru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.

4. Dalam hal ini, ada baiknya kita mengadopsi sistem pembinaan karier model militer, di mana kader-kader terbaik harus ditempa terlebih dahulu di daerah-daerah yang penuh tantangan yang tidak mudah (*contexts of stringency*).
5. Sebagai jangka panjang, perlu dilakukan strategi untuk mencari bibit unggul dalam profesi keguruan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan pengakuan dan penghasilan yang lebih kompetitif bagi profesi guru, sehingga hal ini bisa memikat para lulusan terbaik dari SMA untuk melanjutkan ke program keguruan. Keberhasilan pendidikan Finlandia, sebagaimana disebutkan di atas, tidak bisa dilepaskan dari faktor ini. Simola (2005) mensinyalir bahwa program keguruan di Finlandia termasuk jurusan paling diminati oleh para lulusan terbaik SMA, sehingga wajar jika kebanyakan guru Finlandia merupakan bibit unggul yang berkualitas.

Oleh karena itu demi program pemerataan kualitas sekolah, maka seluruh guru di bawah naungan Dinas Pendidikan (Diknas) Kota/Kabupaten harus siap-siap untuk hijrah ke sekolah lain. Hal demikian seiring adanya kebijakan diknas yang akan pemeratakan kualitas guru di seluruh sekolah. Program ini untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota/Kabupaten tertentu agar merata. Sehingga tidak ada sekolah yang kualitasnya sangat menonjol karena guru yang berkualitas

menumpuk di sekolah tersebut. Sementara di sisi lain masih ada sekolah yang jauh tertinggal secara kualitas.

C. Peraturan Bersama Lima Menteri

Peraturan bersama yang disepakati lima menteri, terdiri dari Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama, serta dituangkan dalam surat-surat keputusan Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Ruang lingkup guru Pegawai Negeri Sipil terdiri dari guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa/raudhatul athfal/bustanul athfal, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah/madrasah aliyah kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah.

Peraturan bersama tersebut mengemukakan bahwa penataan guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing satuan pendidikan. Pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis

pendidikan, antarkabupaten/kota, dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan, penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antar jenjang, dan antarjenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu Gubernur bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi yang kelebihan atau kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil. Gubernur juga mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil untuk penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

Bupati/Walikota bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antar jenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang kelebihan dan kekurangan guru Pegawai Negeri Sipil. Bupati/Walikota mengoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan guru Pegawai Negeri Sipil untuk penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.

Penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil antar satuan pendidikan, antar jenjangjenis pendidikan adalah berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan guru sesuai dengan kebijakan standarisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang berbasis pada positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan metode survei dan eksperimen, dengan instrumen penelitian berupa angket dan kuesioner, dan jenis data berupa angka (kuantitatif), kemudian dianalisis melalui alat analisis statistik (Creswell, 2010: 216).

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang banyak digunakan dalam penelitian bidang sosial, termasuk pendidikan. Metode ini merupakan juga metode penelitian yang paling sering digunakan dalam ilmu sosial (Babbie, 1987). Dalam hal ini, subjek penelitian dianggap sebagai responden atau informan. Metode survei dapat digunakan untuk menjangkau informasi mengenai kecenderungan, opini, sikap, pilihan, dan persepsi orang atau subyek yang diteliti (Andriani, 2011)

Dalam rancangan penelitian yang menggunakan metode survei, peneliti mendeskripsikan secara kuantitatif kecenderungan-kecendrungan, perilaku-perilaku, atau opini-opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut. Dari sampel ini, peneliti melakukan generalisasi atau membuat klaim-klaim tentang populasi itu (Creswell, 2010)

B. Tipe dan Jenis Penelitian

Tipe dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode atau tujuan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa tertentu pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005). Sedangkan menurut Whitney (1960) penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Sementara menurut Andriani (2011) tujuan penelitian yang bersifat deskriptif dicirikan dengan keinginan peneliti untuk melukiskan atau menggambarkan secara verbal dan grafis terhadap situasi atau peristiwa yang ia amati.

C. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri dan di Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Banjarmasin. Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Banjarmasin sebanyak 34 sekolah, dengan jumlah guru PNS sebanyak 1056 orang, sementara jumlah Menengah Atas Negeri Kota Banjarmasin sebanyak 13 sekolah, dengan jumlah guru sebanyak 529 orang.

Teknik penentuan sampling menggunakan teknik total sampling, artinya seluruh anggota populasi dijadikan responden, yaitu semua guru PNS yang terdapat dalam daftar guru PNS di Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Banjarmasin.

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber primer data diperoleh dari kepala sekolah atau kepala tata usaha. Data primer adalah dokumen tentang data jumlah guru di tiap sekolah yang memuat antara lain; kualifikasi akademik, keilmuan, pengalaman pengajar, jenis kelamin, status sertifikasi, termasuk kategori lebih atau kurang. Sumber data primer yang utama adalah Daftar Guru PNS di sekolah, Laporan Bulanan Sekolah, Analisis Kebutuhan Guru PNS, dan Jadwal Mengajar.

Sumber dan jenis data sekunder diperoleh dari hasil FGD dengan K3S terhadap guru yang kelebihan kuota di sekolah tentang aspirasi jika dilakukan mutasi, dan wawancara dengan beberapa kepala SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan dokumentasi tentang Daftar Guru PNS di sekolah, Laporan Bulanan Sekolah, Analisis Kebutuhan Guru PNS, dan Jadwal Mengajar, yang memuat informasi tentang jumlah guru, posisi guru mata pelajaran di sekolah berbasis latar jenis kelamin, pengalaman kerja, kualifikasi akademik dan status sertifikasi, dan FGD dengan K3S tentang guru yang melebihi kuota baik jumlah maupun jam mengajar dan aspirasi terhadap penataan dan redistribusi guru PNS, serta wawancara dengan beberapa kepala SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan terhadap data yang terkumpul. Data yang diolah adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah berupa jumlah guru SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin, baik dalam perspektif umum maupun per mata pelajaran, jumlah kelebihan dan kekurangan guru, selisih antara kelebihan dan kekurangan, jumlah guru yang dibutuhkan secara umum, maupun secara nyata per mata pelajaran, serta tindakan nyata berupa penataan dan redistribusi. Sementara data kualitatif diperoleh dari kata-kata, aspirasi atau informasi yang diperoleh dari forum FGD K3S dan wawancara dengan beberapa kepala SMP Negeri dan SMA Negeri. Data kuantitatif dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif menggunakan teknik statistik menggunakan tabel distribusi frekuensi, sehingga diperoleh presentasi terhadap total frekuensi.

Sementara data yang diperoleh dari hasil wawancara dan FGD dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Wahyu, 2009: 70-72) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas data analisis, yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data berarti merangkum, dan memilih hal-hal pokok pada data yang telah dikumpulkan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari yang berkenaan dengan penataan dan redistribusi guru SMP Negeri dan SMA Negeri yang jumlahnya mengalami kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan jumlah nyata.

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan teks naratif berupa uraian aspirasi terhadap penataan dan redistribusi guru SMP Negeri dan SMA Negeri yang jumlahnya mengalami kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan jumlah nyata.

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan setelah menggabungkan data-data yang telah didapat mengenai aspirasi terhadap penataan dan redistribusi guru SMP Negeri dan SMA Negeri yang jumlahnya mengalami kelebihan dan kekurangan dari kebutuhan jumlah nyata.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian direncanakan berlangsung dari bulan Juni – September 2012.

Rancangan jadwal penelitian diuraikan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan				Keterangan
		6	7	8	9	
1	Pengajuan Proposal	X				
2	Kontrak Pekerjaan	X				
3	Rapat Persiapan Pengumpulan Data	X				
4	Pengumpulan Data Lapangan		X	X		
5	Tabulasi Data			X		
6	Analisis Data			X	X	
7	Penulisan Draft Laporan				X	
8	Expose Hasil Penelitian				X	
9	Perbaikan Laporan				X	
10	Pelaporan				X	

H. Biaya Penelitian

Jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dari dana RAB Bappeda Kota Banjarmasin tahun 2012.

H. Pelaksana Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, yang terdiri dari :

Koordinator : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Lambung Mangkurat

Ketua : Dr. H. Sarbaini, M.Pd

Anggota : Nasruddin, S.Pd., M.Sc

Dra.Hj. Fatimah, M.Hum

Mariatul Kiftiah, M.Pd

Syahlan Mattiro, M.Si

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Daerah Penelitian

1. Lokasi

Kota Banjarmasin terletak pada 3°15' sampai 3°22' Lintang Selatan dan 114°32' Bujur Timur, ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m di bawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang. Kota Banjarmasin berlokasi daerah kuala Sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur sungai Barito. Letak Kota Banjarmasin nyaris di tengah-tengah Indonesia. Kota Banjarmasin dibelah oleh sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Menurut data statistik 2011 dari seluruh luas wilayah Kota Banjarmasin yang kurang lebih 72 km² ini dapat dipersentasikan bahwa peruntukan tanah saat sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111,9 ha, perindustrian 278,6 ha, jasa 443,4 ha, pemukiman adalah 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan penambahan kepadatan penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi. Batas-batas wilayah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- Utara : Sungai Alalak (seberangnya kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
- Selatan : Kabupaten Banjar (kecamatan Tatah Makmur)
- Barat : Sungai Barito (seberangnya kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
- Timur : Kabupaten Banjar (kecamatan Sungai Tabuk dan Kertak Hanyar

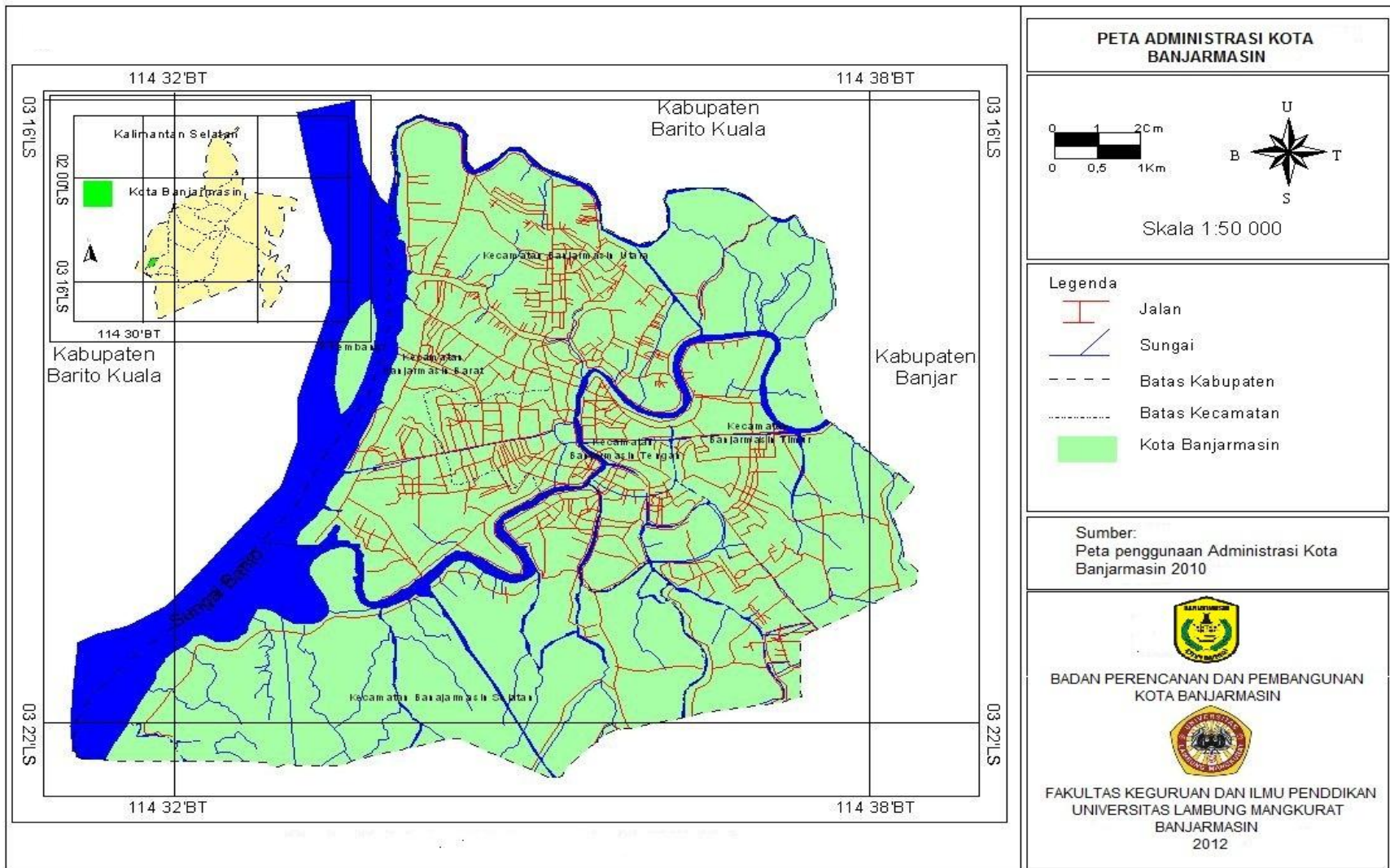
Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan dengan masing-masing luas wilayah kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.
Luas Wilayah Kota Banjarmasin menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin

NO	KECAMATAN	LUAS (km ²)	%
1	Banjarmasin Barat	13.37	18.57
2	Banjarmasin Selatan	20.18	28.03
3	Banjarmasin Tengah	11.66	16.19
4	Banjarmasin Timur	11.54	16.03
5	Banjarmasin Utara	15.25	21.18
	TOTAL	72.00	100.00

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2010 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa luas wilayah Kota Banjarmasin yakni 72 km², dengan luas wilayah tertinggi yakni di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan yakni 20,18 km² (28,03%) dan terendah di Kecamatan Banjarmasin Tengah yakni 11,54 km² (16,03%). Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan sentral atau pusat-pusat pelayanan di Kota Banjarmasin meliputi perdagangan, pemerintahan atau dengan kata lain sebagai simpul jasa, meskipun wilayah kecamatan lainnya memiliki fungsi yang sama namun frekuensi yang relatif lebih rendah.



2. Topografi

Wilayah kota Banjarmasin secara topografi terletak pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut atau merupakan daerah dataran yang terdiri dari rawa-rawa atau sering disebut sebagai daerah dataran banjir dengan luas wilayah 72 km². Oleh karena itu, Kota Banjarmasin memiliki suhu udara yang panas dengan suhu rata-rata 25 – 38 ° C dengan curah hujan bulanan rata-rata sekitar 236 mm dan jumlah hari hujan berkisar 157 hari per tahun. (“Profil dan Potensi Wilayah Kota Banjarmasin”, <http://eissartika.wordpress.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2011).

3. Penggunaan Lahan

Tanah aluvial yang didominasi struktur lempung adalah merupakan jenis tanah yang mendominasi wilayah Kota Banjarmasin. Sedangkan batuan dasar yang terbentuk pada cekungan wilayah berasal dari batuan metaforf yang bagian permukaan ditutupi oleh kerakal, kerikil, pasir dan lempung yang mengendap pada lingkungan sungai dan rawa. Penggunaan tanah di Kota Banjarmasin Tahun 2003 untuk lahan pertanian seluas 2.962,6 Ha, Industri 278,6 Ha, Perusahaan 337,3 Ha, Jasa 486,4 Ha dan Tanah Perumahan 3.135,1 Ha. Dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya lahan pertanian cenderung menurun, sementara untuk lahan perumahan mengalami perluasan sejalan dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Luas optimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebuah kota adalah 30% dari luas kota, dimana Banjarmasin hanya memiliki 10 sampai 12 % RTH saja.

- Pertanian : 3,390,5 Ha (47,09%)
- Industri : 148,9 Ha (3,52%)
- Perkantoran : 298,4 Ha (4,14%)
- Perdagangan dan Jasa : 407,9 Ha (5,66%)
- Perumahan : 2.305 Ha (39,59%)

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut

Tabel 2.
Distribusi Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Banjarmasin

Tahun	Laki (L)	Perempuan (P)	L+P
2011	317.449	317.541	634.990
2010	312.740	312.741	625.481
2009	327.790	311.112	638.902
2007	313.272	302.298	615.570
2006	300.582	302.143	602.725
2004	278.952	293.348	572.300
2003	283.247	282.761	566.008

Sumber: BPS Kota Banjarmasin, 2011

B. HASIL PENELITIAN

1. Posisi Jumlah Guru SMPN dan SMAN di Kota Banjarmasin

a. Perspektif Umum

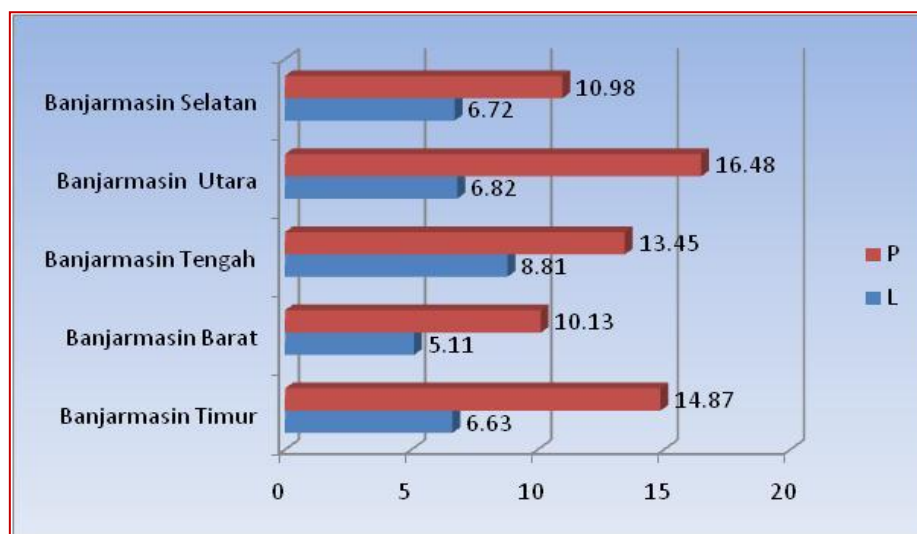
1) Guru SMP Negeri

a) Gender

Tabel 3. Jumlah Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Gender dan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	L		P		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Banjarmasin Timur	70	6.63	157	14.87	227	21.50
2	Banjarmasin Barat	54	5.11	107	10.13	161	15.24
3	Banjarmasin Tengah	93	8.81	142	13.45	235	22.26
4	Banjarmasin Utara	72	6.82	174	16.48	246	23.30
5	Banjarmasin Selatan	71	6.72	116	10.98	187	17.70
	JUMLAH	360	34.09	696	65.91	1056	100

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah guru SMP Negeri Kota Banjarmasin lebih banyak guru perempuan (65.91%) dibandingkan guru laki-laki (34.09%), terutama di Banjarmasin Utara, dengan jumlah tertinggi dari guru perempuan (16.48%), sementara jumlah guru laki-laki tertinggi berada di Banjarmasin Tengah (8.81%), lebih jelasnya dapat disajikan pada gambar berikut.



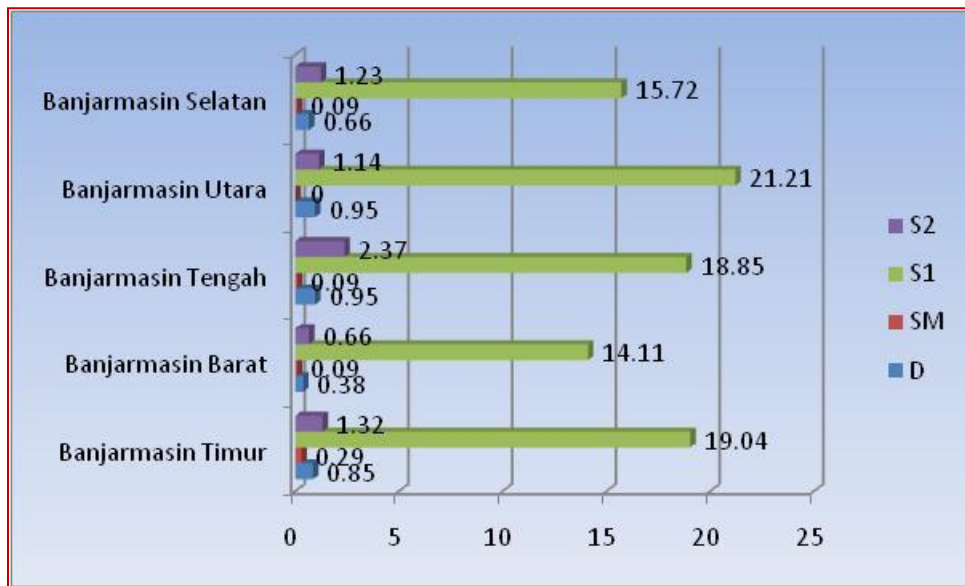
Gambar 4.1. Jumlah Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Gender

b) Pendidikan Tertinggi

Tabel 4. Pendidikan Tertinggi Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	D		SM		S1		S2		TOTAL	
		∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%
1	Banjarmasin Timur	9	0.85	3	0.29	201	19.04	14	1.32	227	21.50
2	Banjarmasin Barat	4	0.38	1	0.09	149	14.11	7	0.66	161	15.24
3	Banjarmasin Tengah	10	0.95	1	0.09	199	18.85	25	2.37	235	22.26
4	Banjarmasin Utara	10	0.95	0	0	224	21.21	12	1.14	246	23.30
5	Banjarmasin Selatan	7	0.66	1	0.09	166	15.72	13	1.23	187	17.70
	JUMLAH	40	3.79	6	0.56	936	88.63	68	6.42	1056	100

Pendidikan tertinggi guru SMP Negeri Kota Banjarmasin kebanyakannya adalah S1 (88.63%), kemudian S2 (6.42%), Diploma (3.79%) dan paling sedikit adalah Sarjana Muda (0.56%). Pendidikan tertinggi S2 dari guru terbanyak berada di Banjarmasin Utara (21.21%), dan S2 terbanyak di Banjarmasin Tengah (2.37%), lebih jelasnya dapat disajikan pada gambar berikut.



GAMBAR 4.2. Pendidikan Tertinggi Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin

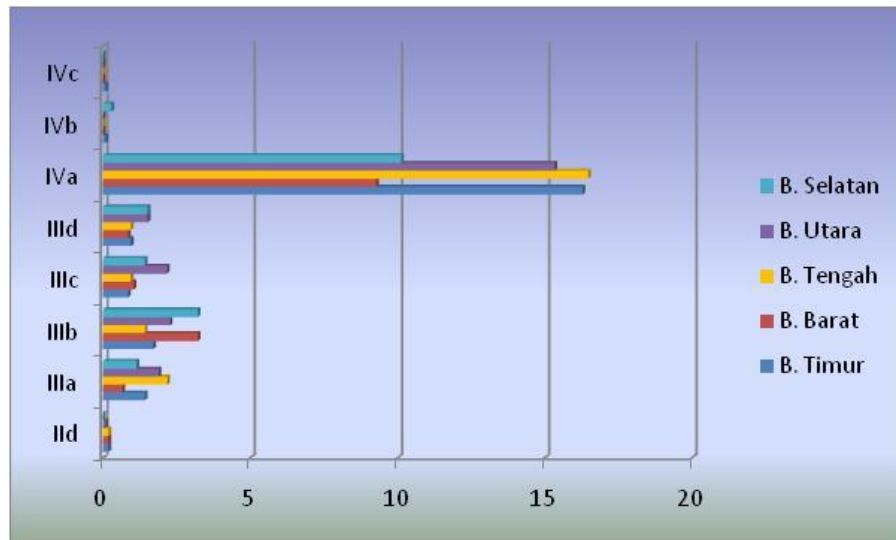
c) Golongan

Tabel 5. Golongan Pangkat Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	Golongan	IId		IIIa		IIIb		IIIc		IIId		IVa		IVb		IVc		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	B. Timur	2	0.19	15	1.42	18	1.71	9	0.85	10	0.95	172	16.29	1	0.09	1	0.09	227	21.50
2	B. Barat	2	0.19	7	0.66	34	3.22	11	1.04	9	0.85	98	9.28	0	0	0	0	161	15.24
3	B. Tengah	2	0.19	23	2.18	15	1.42	10	0.95	10	0.95	174	16.48	0	0	0	0	235	22.26
4	B. Utara	1	0.09	20	1.89	24	2.27	23	2.17	16	1.52	162	15.34	0	0	0	0	246	23.30
5	B. Selatan	0	0	12	1.14	34	3.22	15	1.42	16	1.52	107	10.13	3	0.29	0	0	187	17.70
	JUMLAH	7	0.66	77	7.29	125	11.84	68	6.43	61	5.79	713	67.52	4	0.38	1	0.09	1056	100

Golongan pangkat yang terbanyak dicapai guru SMP Negeri Kota Banjarmasin adalah IVa (67.52%), kemudian IIIb (11.84), disusul IIIc (6.43%), dan yang paling sedikit adalah IId (0.66%), IVb (0.38%) serta IVc (0.09%). Jumlah terbanyak dari guru yang mencapai golongan IVa berada di Banjarmasin Banjarmasin Tengah (16.48%), golongan IIIb di Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Utara, golongan IIIc di Banjarmasin Utara (2.17%). Sementara golongan IVb berada di Banjarmasin Selatan (0.29%) dan Banjarmasin Timur

(0.09%), dan IVc di Banjarmasin Timur (0.09%). Lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut.



c. Golongan Pangkat Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin

d) Umur

Tabel 6. Umur Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	< 33		34-46		> 46		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Banjarmasin Timur	20	1.90	73	6.91	134	12.69	227	21.50
2	Banjarmasin Barat	14	1.33	58	5.48	89	8.43	161	15.24
3	Banjarmasin Tengah	24	2.27	65	6.16	146	13.83	235	22.26
4	Banjarmasin Utara	20	1.89	107	10.14	119	11.27	246	23.30
5	Banjarmasin Selatan	24	2.27	74	7.01	89	8.42	187	17.70
	JUMLAH	102	9.66	377	35.70	577	54.64	1056	100

Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin kebanyakan berumur di atas 46 tahun (54.64%), kemudian disusul oleh guru yang berumur antara 34-46 tahun (35.70%), dan yang paling sedikit adalah guru yang berumur kurang dari 33 tahun (9.66%). Guru yang berumur di atas 46 tahun terbanyak berada di Banjarmasin Tengah (13.83%), sementara yang berumur antara 33-46 tahun

kebanyakannya berada di Banjarmasin Utara (10.14%), dan yang berumur di bawah 33 tahun kebanyakan berada di Banjarmasin Tengah dan di Banjarmasin Selatan (2.27%). Komposisi guru dari aspek umur di seluruh kecamatan Banjarmasin nampaknya didominasi oleh guru yang berusia di atas 46 tahun, sebaiknya komposisi guru yang ideal terdiri dari guru yang berusia antara 34-46 tahun yang lebih banyak dibanding dengan guru yang berusia di atas 46 tahun dan yang berusia di bawah 33 tahun, lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut.



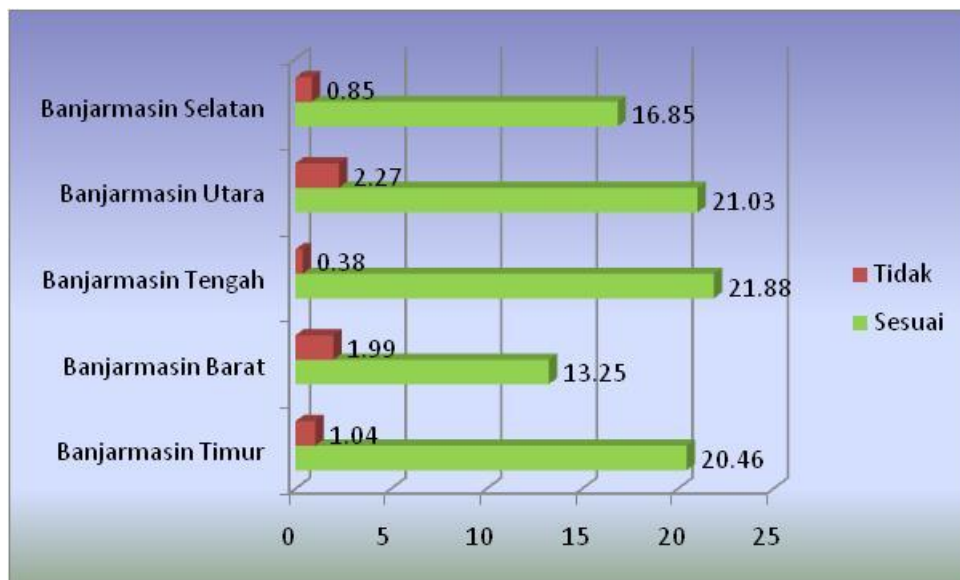
Gambar 4.4. Umur Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

e) Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran

Tabel 7. Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran Pokok yang Diajar oleh Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin

No	KECAMATAN	Sesuai		Tidak		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Banjarmasin Timur	216	20.46	11	1.04	227	21.50
2	Banjarmasin Barat	140	13.25	21	1.99	161	15.24
3	Banjarmasin Tengah	231	21.88	4	0.38	235	22.26
4	Banjarmasin Utara	222	21.03	24	2.27	246	23.30
5	Banjarmasin Selatan	178	16.85	9	0.85	187	17.70
	JUMLAH	987	93.47	69	6.53	1056	100

Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin kebanyakan telah sesuai antara kompetensi keilmuan dengan mata pelajaran pokok yang diajar (93.47%), hanya sedikit yang tidak sesuai (6.53%). Sementara guru yang sesuai tersebut terbanyak berada di Banjarmasin Tengah (21.88%), dan guru yang tidak sesuai terbanyak di Banjarmasin Utara (2.27%). Lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.5. Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran Pokok yang Diajar oleh Guru SMP Negeri Kota Banjarmasin

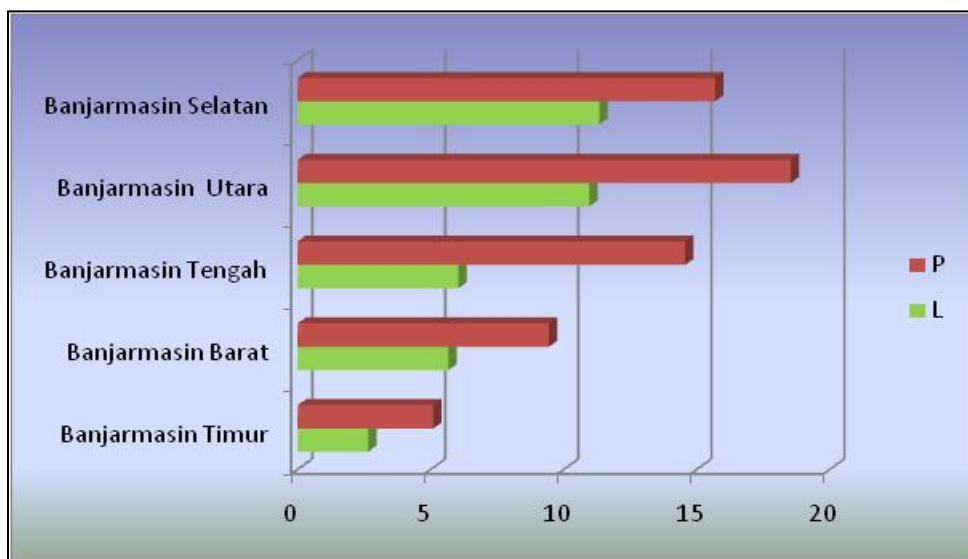
2) Guru SMA Negeri

a) Gender

Tabel 8. Jumlah Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Gender dan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	L		P		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Banjarmasin Timur	14	2.65	27	5.10	41	7.75
2	Banjarmasin Barat	30	5.67	50	9.45	80	15.12
3	Banjarmasin Tengah	32	6.05	77	14.56	109	20.60
4	Banjarmasin Utara	58	10.96	98	18.53	156	29.49
5	Banjarmasin Selatan	60	11.34	83	15.69	143	27.03
	JUMLAH	194	36.67	335	63.33	529	100

Jumlah guru SMA Negeri di Kota Banjarmasin kebanyakannya adalah guru perempuan (63,33%) daripada guru laki-laki (36,67%), terutama yang terdapat di wilayah Banjarmasin Utara, nampaknya guru perempuan (18,53%) juga terbanyak jumlahnya. Sementara untuk jumlah guru laki-laki terbanyak berada di Banjarmasin Selatan (11,34%). Jumlah guru perempuan (5,10%) dan guru laki-laki (2,65%) yang paling sedikit terdapat di Banjarmasin Timur.



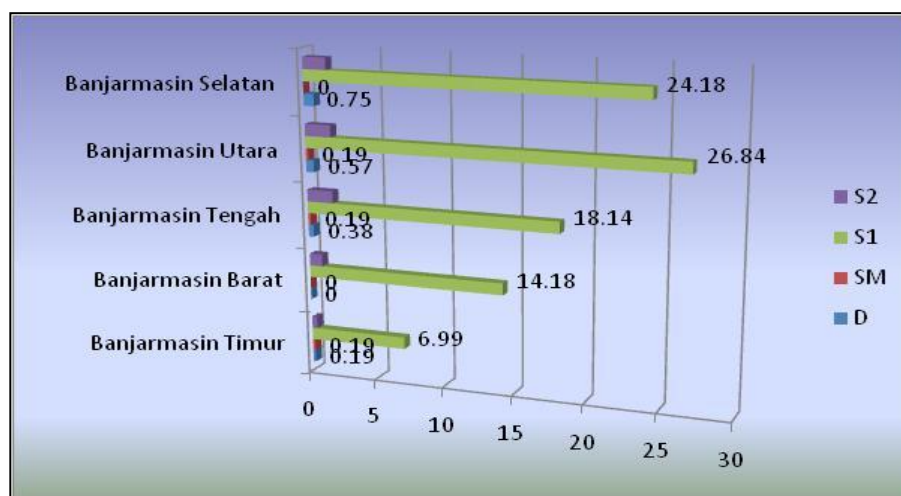
Gambar 4.6. Jumlah Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Gender

b) Pendidikan Tertinggi

Tabel 9. Pendidikan Tertinggi Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	D		SM		S1		S2		JUMLAH	
		∑	%	∑	%	∑	%	∑	%	∑	%
1	Banjarmasin Timur	1	0.19	1	0.19	37	6.99	2	0.38	41	7.75
2	Banjarmasin Barat	0	-	0	-	75	14.18	5	0.94	80	15.12
3	Banjarmasin Tengah	2	0.38	1	0.19	96	18.14	10	1.89	109	20.60
4	Banjarmasin Utara	3	0.57	1	0.19	142	26.84	10	1.89	156	29.49
5	Banjarmasin Selatan	4	0.75	0	-	128	24.18	9	1.70	143	27.03
	JUMLAH	10	1.89	3	0.57	478	90.34	36	6.80	529	100

Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin ternyata kebanyakan telah berpendidikan S1 (90,34%), kemudian berpendidikan S2 (6,80%), dan masih ada guru yang masih berpendidikan Diploma (1,89%) serta Sarjana Muda (0,57%). Jumlah guru yang terbanyak berpendidikan S1 terdapat di Banjarmasin Utara (26,84%), sementara yang berpendidikan S2 terbanyak berada di Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara (1,89%). Sedangkan guru yang masih berpendidikan Diploma, kebanyakan terletak di Banjarmasin Selatan (0,75%) dan Sarjana Muda (0,9%) berada di kawasan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara, lebih jelasnya disajikan pada table berikut.



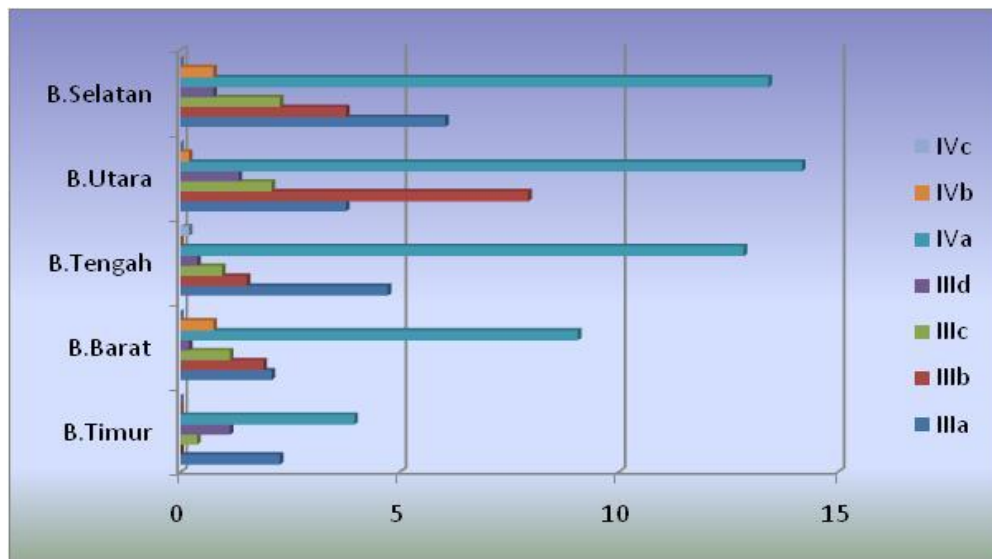
Gambar 4.7. Pendidikan Tertinggi Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin

c) Golongan

Tabel 10. Golongan Pangkat Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	GOLONGAN	IIIa		IIIb		IIIc		IIId		IVa		IVb		IVc		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	B.Timur	12	2.27	0	-	2	0.38	6	1.13	21	3.97	0	-	0	-	41	7.75
2	B.Barat	11	2.08	10	1.89	6	1.13	1	0.19	48	9.07	4	0.75	0	-	80	15.12
3	B.Tengah	25	4.73	8	1.51	5	0.95	2	0.38	68	12.85	0	-	1	0.19	109	20.60
4	B.Utara	20	3.78	42	7.94	11	2.08	7	1.33	75	14.18	1	0.19	0	-	156	29.49
5	B.Selatan	32	6.04	20	3.78	12	2.27	4	0.75	71	13.42	4	0.75	0	-	143	27.03
	JUMLAH	100	18.90	80	15.12	36	6.81	20	3.78	283	53.49	9	1.70	1	0.19	529	100

Golongan pangkat yang mampu dicapai oleh guru SMA Negeri Kota Banjarmasin kebanyakannya adalah golongan IVa (53,49%), kemudian menyusul berturut-turut golongan IIIa (18,90%), golongan IIIb (15,12%), golongan IIIc (6,81%), golongan IIId (3,78%), golongan IVb (1,70%) dan yang paling sedikit golongan yang mampu dicapai guru adalah IVc (0,19%). Guru yang mempunyai golongan IVa kebanyakannya berada di Banjarmasin Utara (14,18%), golongan IIIa, terbanyak berada di Banjarmasin Selatan (6,04%), golongan IIIb kebanyakan bertempat di Banjarmasin Utara (7,94%), sementara golongan IIIc kebanyakannya berada di Banjarmasin Selatan (2,27%), golongan IIId terbanyak terletak di Banjarmasin Timur (1,13%), golongan IVb (0,75%) di Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Barat, sedangkan golongan IVc hanya terdapat di Banjarmasin Tengah (0,19%).



Gambar 4.8. Golongan Pangkat Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin

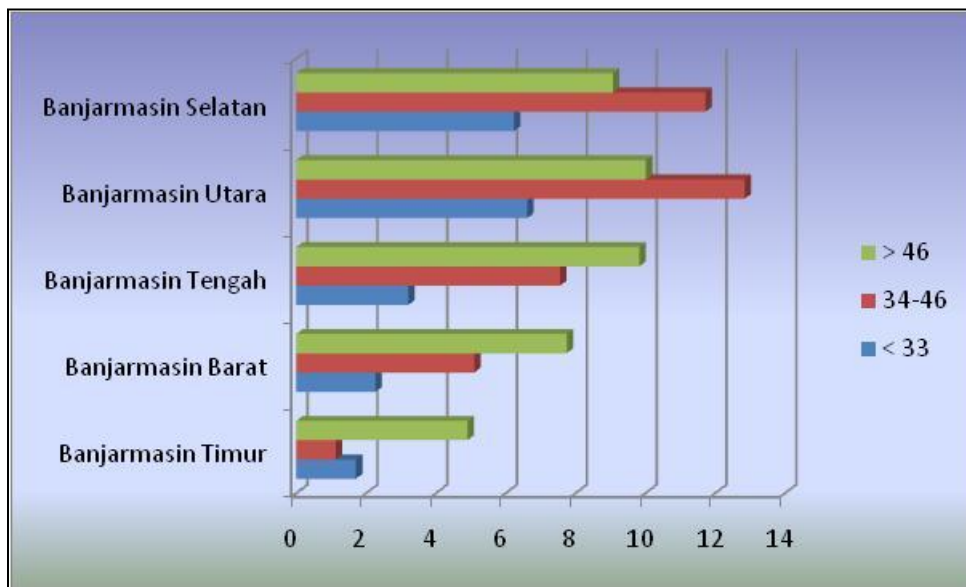
d) Umur

Tabel 11. Umur Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

No	KECAMATAN	< 33		34-46		> 46		TOTAL	
		∑	%	∑	%	∑	%	∑	%
1	Banjarmasin Timur	9	1.71	6	1.13	26	4.91	41	7.75
2	Banjarmasin Barat	12	2.27	27	5.10	41	7.75	80	15.12
3	Banjarmasin Tengah	17	3.21	40	7.56	52	9.83	109	20.60
4	Banjarmasin Utara	35	6.62	68	12.85	53	10.02	156	29.49
5	Banjarmasin Selatan	33	6.24	62	11.72	48	9.07	143	27.03
	JUMLAH	106	20.05	203	38.37	220	41.58	529	100

Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin dilihat berdasarkan wilayah kecamatan, maka kebanyakan telah mencapai usia di atas 46 tahun (41,58%), kemudian disusul oleh guru yang berusia antara 34-46 tahun (38,37%) dan paling sedikit guru yang berusia baru berada di bawah 33 tahun (20,05%). Data ini menunjukkan bahwa guru komposisi jumlah guru kebanyakan didominasi oleh golongan guru yang sudah tua-tua, yakni di atas 46 ke atas. Guru yang berusia 46 ke atas terbanyak berada di Banjarmasin Utara (10,02%), sedangkan guru yang

berusia antara 34-46 tahun kebanyakannya juga berada di Banjarmasin Utara (12,85%) dan juga guru yang berusia di bawah umur 33 tahun (6,62%), karena jumlah guru SMA Negeri yang terbanyak berada di Banjarmasin Utara (29,49%). Oleh karena itu komposisi guru, khususnya di Banjarmasin Timur, Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Barat perlu ditata kembali, agar komposisi guru hendaknya terdiri guru yang berusia antara 34-46 tahun yang lebih banyak di antara guru yang berusia di atas 46 tahun dan di bawah 33 tahun. Komposisi guru yang ideal dari aspek umur dapat dilihat pada komposisi guru yang terdapat di Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan, lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut.



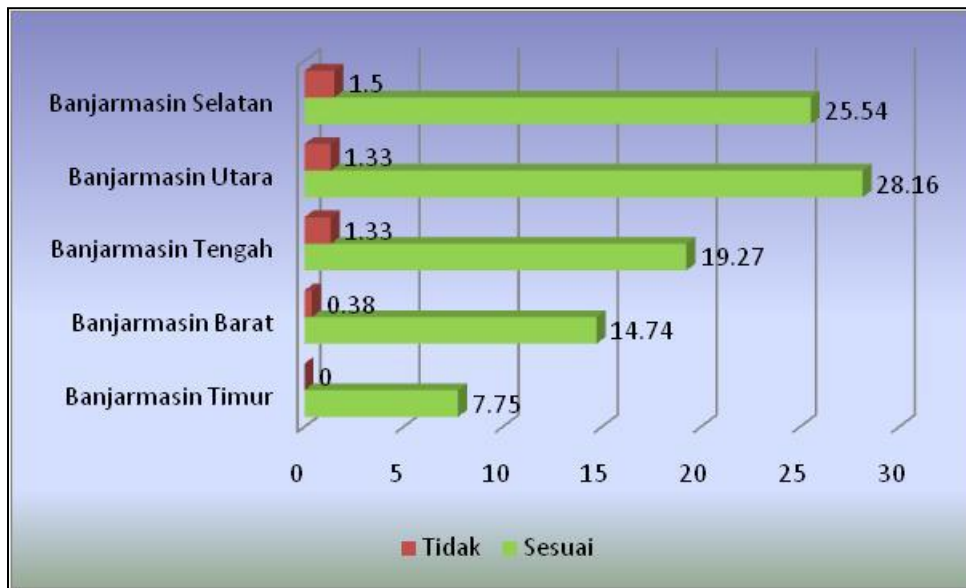
Gambar 4.9. Umur Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin Berdasarkan Wilayah Kecamatan

e) Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran

Tabel 12. Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran Pokok yang Diajar oleh Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin

No	KECAMATAN	Sesuai		Tidak		TOTAL	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Banjarmasin Timur	41	7.75	0	-	41	7.75
2	Banjarmasin Barat	78	14.74	2	0.38	80	15.12
3	Banjarmasin Tengah	102	19.27	7	1.33	109	20.60
4	Banjarmasin Utara	149	28.16	7	1.33	156	29.49
5	Banjarmasin Selatan	135	25.54	8	1.50	143	27.03
	JUMLAH	505	95.46	24	4.54	529	100

Kesesuaian kompetensi keilmuan guru SMA Negeri Kota Banjarmasin dengan mata pelajaran pokok yang diajar nampaknya kebanyakan telah sesuai (95,46%), hanya sebagian kecil saja yang tidak sesuai (4,54%). Hal demikian hampir merata di seluruh wilayah Banjarmasin, yakni Banjarmasin Utara (28,16%), Banjarmasin Selatan (25,54%), Banjarmasin Tengah (19,27%) dan Banjarmasin Barat (14,74%), hanya di Banjarmasin Timur guru-guru seluruhnya telah sesuai antara kompetensi keilmuan dan mata pelajaran pokok yang diajar. Kesesuaian kompetensi keilmuan dengan mata pelajaran pokok yang diajarkan merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kedua kompetensi ini berkaitan dengan penguasaan keilmuan dan materi pelajaran serta kemampuan khusus dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan ciri khas dari mata pelajaran yang dikuasainya, terutama dalam pengelolaan proses pembelajaran, yang berkaitan dengan pendekatan, strategi, model, metode dan evaluasi pembelajaran.



Gambar 4.10. Kesesuaian Kompetensi Keilmuan dan Mata Pelajaran Pokok yang Diajar oleh Guru SMA Negeri Kota Banjarmasin

b. Jumlah Guru Mata Pelajaran

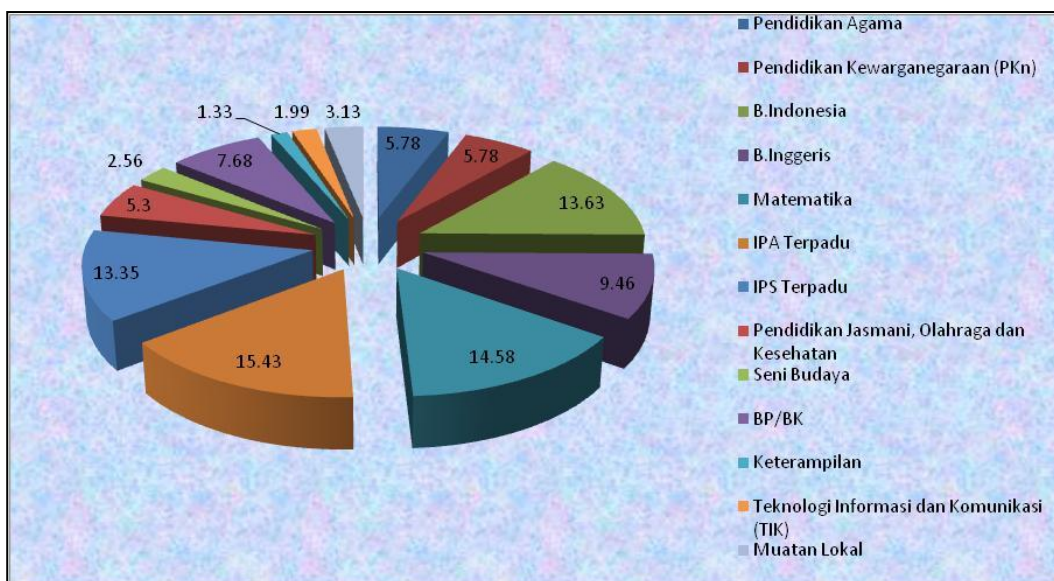
1) Jumlah Guru Mata Pelajaran SMP Negeri Kota Banjarmasin

Tabel 13. Jumlah Guru Mata Pelajaran

No	MATA PELAJARAN	∑	%
1	Pendidikan Agama	61	5,78
2	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	61	5,78
3	B.Indonesia	145	13,63
4	B.Inggris	100	9,46
5	Matematika	154	14,58
6	IPA Terpadu	163	15,43
7	IPS Terpadu	140	13,35
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	56	5,30
9	Seni Budaya	27	2,56
10	BP/BK	81	7,68
11	Keterampilan	14	1,33
12	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	21	1,99
13	Muatan Lokal	33	3,13
	JUMLAH	1056	100,00

Jumlah guru SMP Negeri Kota Banjarmasin berdasarkan mata pelajaran pokok yang diasuhnya, bukan mata pelajaran tambahan, maka guru yang

terbanyak adalah guru mata pelajaran IPA Terpadu (15,43%), menyusul guru mata pelajaran Matematika (14,48%), guru mata pelajaran B.Indonesia (13,63%), guru mata pelajaran IPS Terpadu (13,35%), guru mata pelajaran B.Inggris (9,46%), guru mata pelajaran BP/BK (7,68%), guru mata pelajaran Agama dan PKn masing-masing 5,78%, guru mata pelajaran Penjasorkes (5,30%), guru mata pelajaran Muatan Lokal (3,13%), guru mata pelajaran Seni Budaya (2,56%), guru mata pelajaran TIK (1,99%) dan guru mata pelajaran Keterampilan (1,33%). Dengan demikian kategori jumlah guru yang banyak adalah guru mata pelajaran IPA Terpadu, Matematika, B.Indonesia, IPS Terpadu dan B. Sementara jumlah guru kategori sedikit adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal, Seni Budaya, TIK dan Keterampilan, lebih jelasnya dapat disajikan pada table berikut.



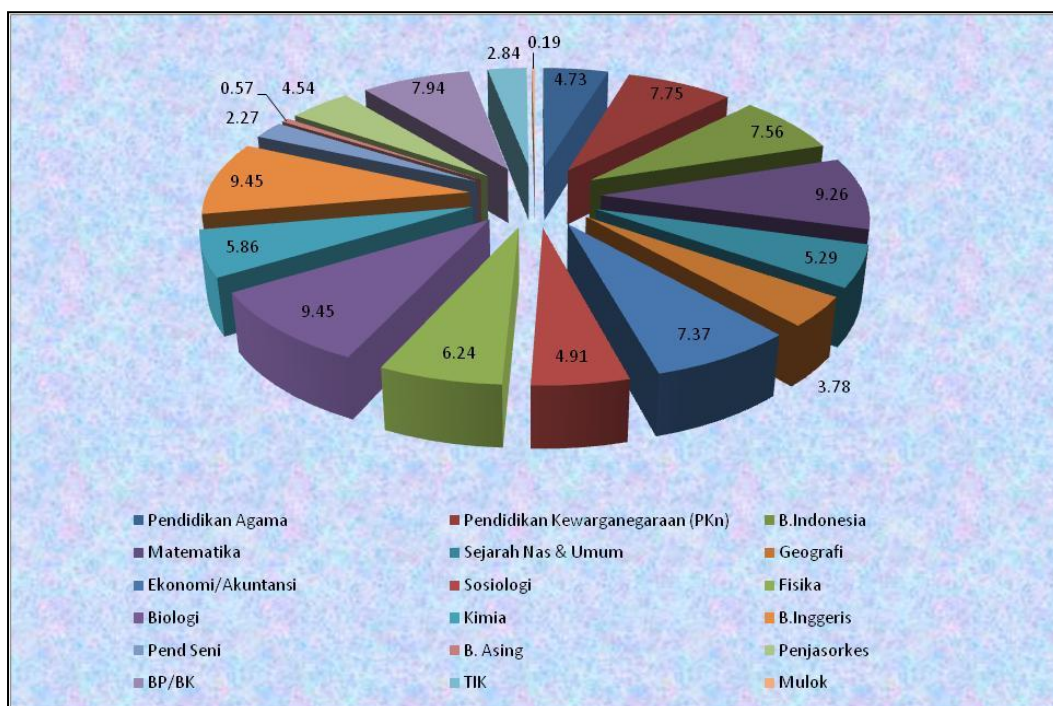
Gambar 4.11. Persentase Guru SMP Negeri per mata Pelajaran Kota Banjarmasin

2) Jumlah Guru Mata Pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin

Tabel 14. Jumlah Guru Mata Pelajaran

No	MATA PELAJARAN	Σ	%
1	Pendidikan Agama	25	4,73
2	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	41	7,75
3	B.Indonesia	40	7,56
4	Matematika	49	9,26
5	Sejarah Nas & Umum	28	5,29
6	Geografi	20	3,78
7	Ekonomi/Akuntansi	39	7,37
8	Sosiologi	26	4,91
9	Fisika	33	6,25
10	Biologi	50	9,45
11	Kimia	31	5,86
12	B.Inggris	50	9,45
13	Pend Seni	12	2,28
14	B. Asing	3	0,57
15	Penjasorkes	24	4,54
16	BP/BK	42	7,94
17	TIK	15	2,83
18	Mulok	1	0,18
	JUMLAH	529	100,00

Jumlah guru mata pelajaran SMA Negeri Banjarmasin dilihat per mata pelajaran, maka jumlah gurunya yang terbanyak adalah mata pelajaran Biologi dan B.Inggris (9,45%), menyusul mata pelajaran Matematika (9,26%), BP/BK (7,94%), PKn (7,75%), B.Indonesia (7,56%), Ekonomi/Akuntansi (7,37%), Fisika (6,25%), Kimia (5,86%), Sejarah (5,29%), Sosiologi (4,91%), P.Agama (4,73%), Penjasorkes (4,54%), Geografi (3,78%), TIK (2,83%), Pendidikan Seni (2,28%), B.Asing (0,57%) dan Mulok (0,18%). Dengan demikian kategori jumlah guru yang banyak adalah guru mata pelajaran Biologi, B.Inggris, Matematika, BP/BK, PKn dan B.Indonesia. Sementara kategori jumlah guru yang sedikit adalah guru mata pelajaran TIK, Pendidikan Seni, B.Asing, dan Mulok, lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4.12. Persentase Guru Mata Pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin

2. Jumlah Kelebihan, Kekurangan dan Kebutuhan Guru Materi Pelajaran SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin

a. Guru Mata Pelajaran SMP Negeri Kota Banjarmasin

Tabel 15. Jumlah Guru Mata Pelajaran

No	Mata Pelajaran	GURU PNS		LEBIH		KURANG		SELISIH		KEBUTUHAN	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	P. Agama	61	5,78	3	2,44	8	4,62	5	2,43	66	5,96
2	PKn	61	5,78	7	5,69	7	4,06.	0	0	61	5,51
3	B.Indonesia	145	13,63	24	19,51	1	0,57.	23	11,17	122	11,02
4	B. Inggris	100	9,46	3	2,44	17	9,82.	14	6,80	115	10,39
5	Matematika	154	14,58	19	15,44	6	3,46.	13	6,31	141	12,74
6	IPA Terpadu	163	15,43	37	30,08	7	4,06.	30	14,56	133	12,01
7	IPS Terpadu	140	13,35	24	19,51	7	4,06.	17	8,25	123	11,11
8	Penjasorkes	56	5,30	2	1,63	4	2,31	2	0,97	58	5,24
9	Seni Budaya	27	2,56	0	0	23	13,29	23	11,17	50	4,52
10	BP/BK	81	7,68	2	1,63	21	12,13.	19	9,22	100	9,03
11	Keterampilan	14	1,33	0	0	11	6,36	11	5,34	25	2,26
12	TIK	21	1,99	0	0	28	16,18	28	13,59	49	4,43
13	Mulok	33	3,13	2	1,63	33	19,08	21	10,19	64	5,78
	JUMLAH	1056	100	123	100	173	100	206	100	1107	100

Data di atas menunjukkan bahwa posisi jumlah guru PNS yang ada, kelebihan, kekurangan dan guru yang dibutuhkan guru SMP Negeri Kota Banjarmasin beragam. Guru PNS yang ada di SMP Negeri Kota Banjarmasin dengan jumlah terbanyak adalah guru mata pelajaran IPA Terpadu (15,43%), menyusul guru mata pelajaran Matematika (14,48%), guru mata pelajaran B.Indonesia (13,63%), guru mata pelajaran IPS Terpadu (13,35%), guru mata pelajaran B.Inggris (9,46%), guru mata pelajaran BP/BK (7,68%), guru mata pelajaran Agama dan PKn masing-masing 5,78%, guru mata pelajaran Penjasorkes (5,30%), guru mata pelajaran Muatan Lokal (3,13%), guru mata pelajaran Seni Budaya (2,56%), guru mata pelajaran TIK (1,99%) dan guru mata pelajaran Keterampilan (1,33%). Dengan demikian kategori jumlah guru yang banyak adalah guru mata pelajaran IPA Terpadu, Matematika, B.Indonesia, IPS Terpadu dan B. Sementara jumlah guru kategori sedikit adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal, Seni Budaya, TIK dan Keterampilan.

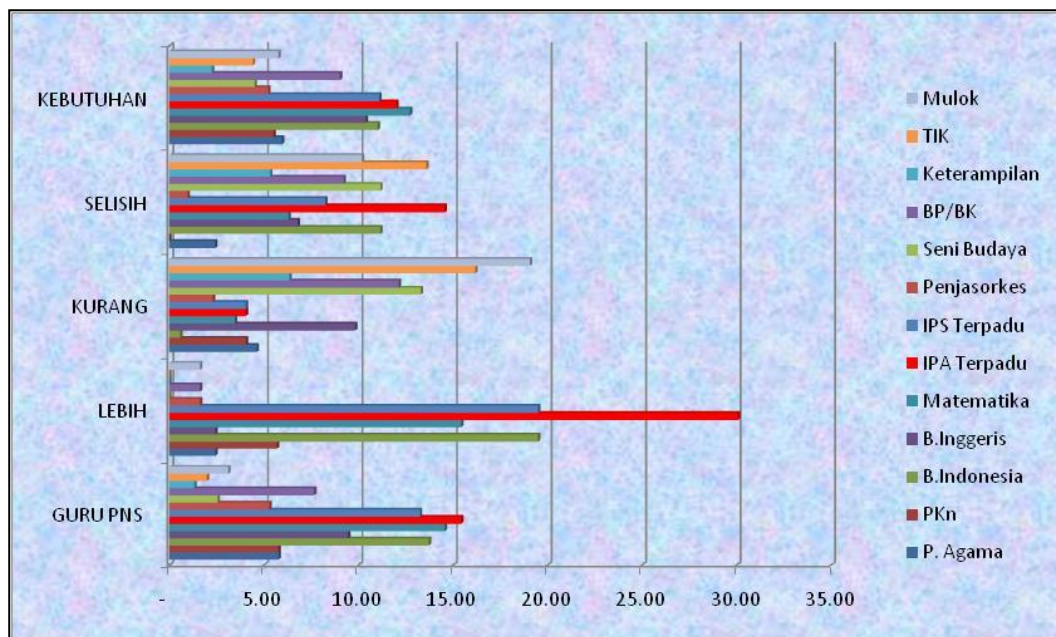
Oleh karena itu, dari jumlah guru PNS Kota Banjarmasin terdapat beberapa guru mata pelajaran yang jumlahnya melebihi kebutuhan sekolah. Jumlah guru mata pelajaran yang melebihi kebutuhan sekolah yang terbanyak adalah guru IPA Terpadu (30,08%), disusul oleh guru IPS Terpadu dan B.Indonesia (19,51%), Matematika (15,44%), dan relatif kecil kelebihannya gurunya adalah mata pelajaran PKn (5,69%), B.Inggris dan Pendidikan Agama (2,44%), serta Penjasorkes, BP/BK dan Mulok (1,63%). Sedangkan guru mata pelajaran Seni Budaya, Ketrampilan dan TIK tidak mengalami kelebihan.

Sementara itu jumlah guru yang mengalami kekurangan dari jumlah guru yang dibutuhkan sekolah, maka jumlah yang terbanyak adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal (19,08%), TIK (16,18%), Seni Budaya (13,29%), BP/BK (12,13%). Sedangkan jumlah yang relatif sedikit dibutuhkan sekolah adalah guru mata pelajaran B.Ingggris (9,82%), Keterampilan (6,36%), Pendidikan Agama (4,62%), PKn, IPA Terpadu, IPS Terpadu (4,06%), Matematika (3,46%), dan yang paling sedikit dibutuhkan adalah guru Penjasorkes (2,31%) dan B.Indonesia (0,57%).

Bilamana dilihat selisih antara jumlah kelebihan dan kekurangan dari jumlah guru PNS yang ada di SMP Negeri Kota Banjarmasin, maka jumlah guru yang kekurangan (173 orang, 59,71%), nampaknya lebih besar dari jumlah guru yang kelebihan (123 orang, 40,29%). Untuk jumlah guru yang kekurangan dari hasil perhitungan selisih, maka jumlah yang terbanyak adalah guru mata pelajaran TIK (13,59%), Seni Budaya (11,17%), Mulok (10,19%), BP/BK (9,22%), B.Ingggris (6,80%), Keterampilan (5,34%) dan Pendidikan Agama (2,43%) dan Penjasorkes (0,97%). Sementara untuk jumlah guru yang kelebihan dari hasil perhitungan selisih, maka jumlah terbanyak adalah guru mata pelajaran IPA Terpadu (14,56%), B.Indonesia (11,17%), IPS Terpadu (8,25%), dan Matematika (6,31%). Sedangkan guru mata pelajaran PKn selisih antara jumlah guru yang kelebihan dan kekurangan adalah 0%.

Dari perhitungan selisih antara jumlah guru yang kelebihan dan guru yang kekurangan, maka diperoleh angka jumlah guru yang dibutuhkan SMP Negeri Kota Banjarmasin, yakni sebanyak 1107 orang, dengan urutan sesuai besaran

jumlah dan prosentase, yaitu guru Matematika, 141 orang (12,74%), guru IPA Terpadu, 133 orang (12,01%), guru IPS Terpadu, 123 orang (11,11%), guru B.Indonesia, 122 orang (11,02%), guru B.Inggris, 115 orang (10,39%), guru BP/BK, 100 orang (9,03%), guru Pendidikan Agama, 66 orang (5,96%), guru Mulok, 64 (5,78%), guru PKn, 61 orang (5,51%), guru Penjasorkes, 58 orang (5,34%), guru Seni Budaya, 50 orang (4,52%), guru TIK, 49 orang (4,43%) dan guru Keterampilan, 25 orang (2,26%). Lebih jelasnya disajikan pada gambar berikut.



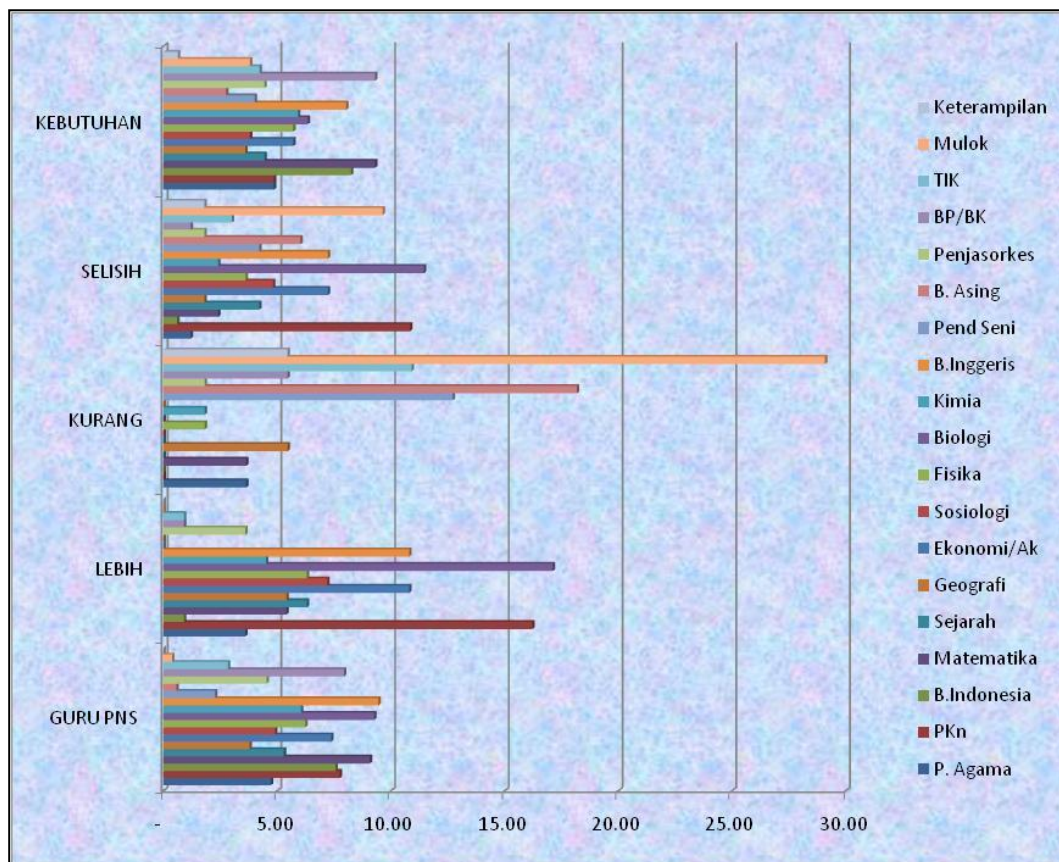
Gambar 4.13. Kelebihan, Kekurangan dan Kebutuhan Guru Materi Pelajaran SMP Negeri Kota Banjarmasin

b. Guru Mata Pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin

Tabel 16. Jumlah Guru Mata Pelajaran

No	Mata Pelajaran	GURU PNS		LEBIH		KURANG		SELISIH		KEBUTUHAN	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	P. Agama	25	4,73	4	3,60	2	3,64	2	1,41	23	4,86
2	PKn	41	7,75	18	16,22	0	0	18	12,68	23	4,86
3	B.Indonesia	40	7,56	1	0,90	0	0	1	0,70	39	8,25
4	Matematika	48	9,07	6	5,41	2	3,64	4	2,82	44	9,30
5	Sejarah	28	5,29	7	6,31	0	0	7	4,93	21	4,44
6	Geografi	20	3,78	6	5,41	3	5,45	3	2,11	17	3,59
7	Ekonomi/Ak	39	7,37	12	10,81	0	0	12	8,45	27	5,71
8	Sosiologi	26	4,91	8	7,21	0	0	8	5,63	18	3,81
9	Fisika	33	6,25	7	6,31	1	1,82	6	4,23	27	5,71
10	Biologi	49	9,26	19	17,11	0	0	19	13,39	30	6,34
11	Kimia	32	5,86	5	4,50	1	1,82	4	2,81	28	5,92
12	B.Inggris	50	9,45	12	10,81	0	0	12	8,45	38	8,03
13	Pend Seni	12	2,28	0	0	7	12,73	7	4,92	19	4,02
14	B. Asing	3	0,57	0	0	10	18,18	10	7,04	13	2,75
15	Penjasorkes	24	4,54	4	3,60	1	1,82	3	2,11	21	4,44
16	BP/BK	42	7,94	1	0,90	3	5,45	2	1,41	44	9,30
17	TIK	15	2,83	1	0,90	6	10,91	5	3,52	20	4,23
18	Mulok	2	0,18	0	0	16	29,09	16	11,28	18	3,81
19	Keterampilan	0	0	0	0	3	5,45	3	2,11	3	0,63
	JUMLAH	529	100,00	111	100,00	55	100,00	166	100,00	473	100,00

Jumlah guru mata pelajaran PNS yang ada di SMA Negeri Kota Banjarmasin yang paling terbanyak adalah guru mata pelajaran B.Inggris (9,45%), disusul oleh Biologi (9,26%), Matematika (9,07%), BP/BK (7,94%), PKn (7,75%), B. Indonesia (7,56%), Ekonomi/Akuntansi (7,37%), Fisika (6,25%), Kimia (5,85%), Sejarah (5,29%), Sosiologi (4,91%), P.Agama (4,73%), Penjasorkes (4,54%), Geografi (3,78%), TIK (2,83%), Pendidikan Seni (2,28%), B.Asing (0,57%), Muatan Lokal (0,18%) dan Keterampilan (0%).



Gambar 4.14. Kelebihan, Kekurangan dan Kebutuhan Guru Materi Pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin

Sementara jumlah guru mata pelajaran yang melebihi kebutuhan guru di SMA Negeri Kota Banjarmasin yang terbanyak adalah guru mata pelajaran Biologi (17,11%), disusul dengan PKn (16,22%), Ekonomi/Akuntansi dan B. Inggris (10,81%), Sosiologi (7,21%), Fisika dan Sejarah (6,31%), Matematika dan Geografi (5,41%), Kimia (4,50%). Sedangkan yang relatif sedikit kelebihan dalam jumlah guru adalah guru Penjasorkes dan Pendidikan Agama (3,60%), B. Indonesia, BP/BK dan TIK masing-masing (0,90%). Adapun guru mata pelajaran yang menunjukkan jumlah kelebihan adalah guru mata pelajaran Pendidikan Seni, B. Asing, Muatan Lokal dan Keterampilan (0%).

Jumlah guru mata pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin, selain menunjukkan kelebihan di satu sisi, pada sisi lainnya terdapat juga jumlah guru yang memperlihatkan kekurangan sebagaimana yang dibutuhkan oleh sekolah. Jumlah guru mata pelajaran yang terbanyak mengalami kekurangan adalah guru Muata Lokal (29,09%), B.Asing (18,18%), Pendidikan Seni (12,73%), TIK (10,91%), Geografi, BP/BK dan Keterampilan (5,45%). Guru yang relatif lebih sedikit jumlah kekurangannya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Matematika (3,64%, kemudian guru mata pelajaran Fisika, Kimia, Penjasorkes (1,82%). Sedangkan jumlah guru yang tidak mengalami kekurangan dari yang dibutuhkan sekolah adalah PKn, B.Indonesia, Sejarah, Ekonomi/Akuntansi, Sosiologi, Biologi dan B.Ingggris (0%).

Bilamana dilihat selisih antara jumlah kelebihan dan kekurangan dari jumlah guru PNS yang ada di SMA Negeri Kota Banjarmasin, maka jumlah guru yang kelebihan (111 orang, 66,87%), nampaknya lebih besar dari jumlah guru yang kekurangan (55 orang, 33,13%). Untuk jumlah guru yang kelebihan dari hasil perhitungan selisih, maka jumlah yang terbanyak adalah guru mata pelajaran Biologi (13,39%), disusul PKn (12,68%), Ekonomi/Akuntansi dan B.Ingggris (8,45%), Sosiologi (5,63%), Sejarah (4,93%), Fisika (4,23%), Matematika dan Kimia (2,82%), Geografi dan Penjasorkes (2,11%), Pendidikan Agama (1,41%) dan B.Indonesia (0,70%). Sementara untuk guru yang kekurangan dari hasil perhitungan selisih, maka jumlah yang terbanyak adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal (11,28%), B.Asing (7,04%), Pendidikan Seni (4,92%), TIK (3,52%), Keterampilan (2,11%), dan BP/BK (1,41%).

Dari perhitungan selisih antara jumlah guru yang kelebihan dan guru yang kekurangan, maka diperoleh angka jumlah guru yang dibutuhkan SMA Negeri Kota Banjarmasin, yakni sebanyak 473 orang, dengan urutan sesuai besaran jumlah dan prosentase, yaitu guru Matematika dan BP/BK, 44 orang (9,30%), guru B.Indonesia, 39 orang (8,25%), guru B.Ingggris, 38 orang (8,03%), guru Biologi, 30 orang (6,34%), guru Kimia, 28 orang (5,92%), guru Ekonomi/Akuntansi dan Fisika, 27 orang (5,71%), guru Pendidikan Agama dan PKn, 23 orang (4,86%), guru Sejarah dan Penjasorkes, 21 orang (4,44%), guru TIK, 20 orang (4,23%), guru Pendidikan Seni, 19 orang (4,02%), guru Sosiologi dan Muatan Lokal, 18 orang (3,81%), guru Geografi, 17 orang (3,59%), guru B.Asing, 13 orang (2,75%) dan guru Keterampilan, 3 orang (0,63%).

3. Selisih Jumlah dan Tindakan Nyata untuk Guru SMP Negeri dan SMA

Negeri Kota Banjarmasin

a. Guru SMP Negeri Per Mata Pelajaran

Tabel 17. Selisih Jumlah dan Tindakan Nyata

No	Mata Pelajaran	Kelebihan	Kekurangan	Selisih	Tindakan
1	Pendidikan Agama	3	8	5	P
2	P. Kewarganegaraan	7	7	0	P
3	Bahasa Indonesia	24	1	23	R
4	Bahasa Inggris	3	17	14	P
5	Matematika	19	6	13	R
6	IPA Terpadu	37	7	30	R
7	IPS Terpadu	24	7	17	R
8	Seni Budaya	2	4	2	P
9	Penjasorkes	0	23	23	P
10	TIK	2	21	19	P
11	Muatan Lokal	0	11	11	P
12	KTK	0	28	28	P
13	BP/BK	2	33	21	P
	JUMLAH	123	173	206	

Keterangan :

R = Redistribusi guru ke sekolah lain

P = Penambahan guru atau jam pelajaran guru yang masih kurang

Data di atas menunjukkan terdapat beberapa guru mata pelajaran yang melebihi jumlah yang dibutuhkan, akan tetapi ditemui juga jumlah guru yang mengalami kekurangan. Untuk guru-guru mata pelajaran IPA Terpadu, B.Indonesia, IPS Terpadu, Matematika, perlu dilakukan redistribusi. Sementara para guru Penjasorkes, KTK, BP/BK, TIK, B.Inggris, Muatan Lokal, dan Seni Budaya serta PKn hendaknya dilakukan tindakan penambahan guru atau jam pelajaran guru yang masih kurang.

b. Guru SMA Negeri Per Mata Pelajaran

Tabel 18. Selisih Jumlah dan Tindakan Nyata

No	Mata Pelajaran	Kelebihan	Kekurangan	Selisih	Tindakan
1	P. Agama	4	2	2	R
2	PKn	18	0	18	R
3	B.Indonesia	1	0	1	R
4	Matematika	6	2	4	R
5	Sejarah	7	0	7	R
6	Geografi	6	3	3	R
7	Ekonomi/Ak	12	0	12	R
8	Sosiologi	8	0	8	R
9	Fisika	7	1	6	R
10	Biologi	19	0	19	R
11	Kimia	5	1	4	R
12	B.Inggris	12	0	12	R
13	Pend Seni	0	7	7	P
14	B. Asing	0	10	10	P
15	Penjasorkes	4	1	3	R
16	BP/BK	1	3	2	P
17	TIK	1	6	5	P
18	Mulok	0	16	16	P
19	Keterampilan	0	3	3	P
	JUMLAH	111	55	166	

Keterangan :

R = Redistribusi guru ke sekolah lain

P = Penambahan guru atau jam pelajaran guru yang masih kurang

Jika secara dilihat secara keseluruhan, nampaknya jumlah guru yang akan dikenakan tindakan restribusi lebih banyak dibandingkan dengan penambahan. Hal demikian disebabkan karena jumlah guru yang kelebihan lebih banyak dari pada jumlah guru yang kekurangan. Untuk jumlah guru yang menunjukkan kelebihan dan layak dilakukan tindakan restribusi dari yang terbanyak hingga jumlah yang sedikit berturut-turut adalah guru Biologi, 19 orang, guru PKn, 18 orang, guru Ekonomi/Akuntansi dan B.Inggris, sebanyak 12 orang, guru Sosiologi, 8 orang, guru Sejarah, 7 orang, Fisika, 6 orang, Matematika dan

Kimia, 4 orang, Geografi dan Penjasorkes , 3 orang, Pendidikan Agama, 2 orang dan B.Indonesia sebanyak 1 orang.

Sementara jumlah guru yang menunjukkan kekurangan dari jumlah yang dibutuhkan dan layak dilakukan tindakan penambahan guru atau jumlah beban mengajarnya adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal sebanyak 16 orang, guru B.Asing sebanyak 10 orang, guru TIK, 5 orang, guru Keterampilan sebanyak 3 orang dan guru BP/BK 2 orang.

4. Aspirasi Terhadap Penataan dan Redistribusi Guru SMP Negeri dan SMA Negeri di Kota Banjarmasin Akibat Kelebihan dan Kekurangan Guru Mata Pelajaran

Aspirasi terhadap penataan dan redistribusi guru digali melalui wawancara dengan beberapa kepala sekolah dan Focus Discussion Group dengan para Kepala SMP Negeri Kota Banjarmasin yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 dalam rapat K3S di SMP Negeri 2 Banjarmasin.

Dari hasil wawancara dan Focus Discussion Group tersebut diperoleh aspirasi terhadap pelaksanaan Penataan dan Redistribusi terhadap para guru yang jumlahnya mengalami kelebihan dan kekurangan di SMP dan SMA Negeri Kota Banjarmasin, yaitu :

- a. Tindakan untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan jumlah guru di SMPN dan SMAN untuk menuju ke arah penataan dan pemerataan, maka

diperlukan tindakan berupa redistribusi dan penambahan guru atau jumlah guru yang kurang.

b. Sebelum dilakukan tindakan redistribusi dan penambahan, hendaknya dilakukan sosialisasi dalam bentuk :

1) ke sekolah-sekolah secara langsung kepada kepala sekolah dan para guru yang diindikasikan termasuk, khususnya guru yang akan terkena tindakan redistribusi. Tindakan sosialisasi juga dilakukan untuk menyerap aspirasi dari kepala sekolah dan guru yang bersangkutan.

2) Mengundang para kepala sekolah dan para guru yang berindikasi terkena tindakan redistribusi dan melakukan dialog tentang tata cara teknis sebaiknya dalam melakukan redistribusi tersebut.

c. Perlu dilakukan pemetaan sekolah, sehingga diperoleh data sekolah dengan mutu tinggi, sedang dan rendah. Ketiga peringkat sekolah ini menjadi acuan untuk penataan dan redistribusi guru.

d. Kinerja guru dipetakan atas guru berkinerja tinggi, sedang dan rendah.

e. Kelebihan guru yang berusia muda di bawah 33 tahun dan antara 33-46 tahun sebaiknya ditempatkan di sekolah yang berada di pinggiran atau peringkat rendah. Jika mereka menunjukkan prestasi atau kinerja tinggi, baru dipindah ke sekolah peringkat sedang, terus ke peringkat tinggi. Siklus pemindahan, baik berupa penataan atau redistribusi ini hendaknya menjadi siklus yang permanen, dengan memperhitungkan juga masa kerja. Masa kerja sebaiknya periode lima tahunan.

- f. Sebelum dilakukan teknis redistribusi guru, sebaiknya dilakukan penentuan kriteria guru yang akan direstribusi dan prosedur tata cara restribusi.
- g. Penentuan kriteria guru yang direstribusi adalah melihat kepada usia, yakni prioritas yang berumur 34-46 tahun, masa kerja di sekolah, kesesuaian kompetensi keilmuan, melebihi jumlah beban guru jam mengajar, kinerja dan berorientasi pada peningkatan mutu pada sekolah yang akan menerima, bukan guru buang, khususnya jika ditempatkan di sekolah pinggiran.
- h. Prosedur pemindahan guru yang termasuk kriteria redistribusi hendaknya:
 - 1) Melibatkan semua pihak yang terkait antara dinas pendidikan, kepala sekolah dan Unlam. Jika perlu dibentuk tim independen yang melaksanakan atau memantau, terdiri dari dinas pendidikan, K3S dan Unlam, agar pelaksanaan redistribusi berjalan sesuai dengan asas penataan dan pemerataan secara objektif, konsisten dan konsekuen dengan regulasi yang ada.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebelum tindakan redistribusi dan dengan melakukan konfirmasi saat dan sesudah tindakan redistribusi; agar kepala sekolah mengetahui sosok guru yang akan direstribusi atau menerima guru yang direstribusi dan menyiapkan kondisi kondusif sebaik mungkin
 - 3) Dilakukan secara serentak pada masa libur sebelum awal tahun ajaran.
 - 4) Surat Keputusan penempatan guru redistribusi diberikan menjelang awal atau akhir semester

- 5) Restribusi guru hendaknya diprioritaskan kepada sekolah atau wilayah yang terdekat.
- i. Perlu perubahan paradigma kerja dari para guru bahwa pemindahan ke sekolah lain, bukan sebagai tindakan penghukuman, tetapi dalam rangka penyegaran. Karena tindakan redistribusi guru bukan hanya kepada guru yang kinerjanya rendah, tetapi bisa jadi kepada guru yang kinerja baik, namun lebih kepada promosi jabatan, misalnya menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.
 - j. Perlu penataan keseragaman format data guru PNS di sekolah dan pemantauan berkala terhadap analisis kebutuhan guru yang dilakukan sekolah, jangan hanya diserahkan kepada Tata usaha sekolah.
 - k. Untuk sekolah yang gurunya mengalami kelebihan jumlah dan beban jam mengajar, sebaik ditambah ruang belajar saja, atau membuka unit atau sekolah yang baru.

C. Pembahasan

1. Posisi Jumlah Guru SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin

Guru SMP Negeri dan SMA Negeri di Kota Banjarmasin ternyata lebih banyak perempuan daripada guru lelaki, dan sama-sama berad di kecamatan Banjarmasin Utara. Jika guru lelaki SMP Negeri lebih banyak di Kecamatan Banjarmasin Tengah, maka guru SMA Negeri lebih banyak di Banjar Selatan. Komposisi jumlah guru dari aspek gender telah menunjukkan kurang meratanya penyebaran guru, khususnya salah satu jenis kelamin guru yang lebih banyak terpusat pada satu kecamatan

tertentu. Kurang meratanya penyebaran guru dari susut gender, menunjukkan adalah kekeliruan dalam kebijakan dan teknik penempatan guru atau kurang akuratnya data yang dijadikan sebagai acuan dalam pemetaan dan penempatan guru.

Dilihat dari tingkat pendidikan, maka baik guru SMP Negeri maupun SMA Negeri kebanyakan telah memenuhi persyaratan kompetensi akademik, yakni telah berijazah S1, bahkan sebagian telah ada yang mencapai S2 bahkan S3. Namun demikian ternyata di antara guru SMP Negeri dan SMA Negeri masih terdapat para guru yang masih berpendidikan Sarjana Muda, bahkan berpendidikan Diploma. Terhadap guru yang berpendidikan Sarjana Muda dan Diploma, maka diperlukan tindakan oleh pihak Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas kompetensi akademik, namun jika usia telah mendekati pensiun, maka guru yang bersangkutan dibiarkan saja, hingga masa kepegawaian berakhir.

Guru SMP Negeri dan SMA Negeri kebanyakan telah mampu mencapai golongan IV, namun sedikit sekali yang mencapai IVb, terutama IVc, Bahkan dapat dikatakan guru golongan IVa ini menunjukkan mayoritas di seluruh SMP Negeri dan SMA Negeri. Hal demikian menunjukkan bahwa para guru yang berusia di atas 46 tahun dan sebagian guru yang berusia di antara 33-46 tahun banyak yang tertahan pangkatnya di golongan IVa. Hal demikian terdapat kecenderungan adanya bahwa kebanyakan guru di SMP Negeri dan SMA Negeri adalah berada di golongan IVa dan berusia di atas lebih dari 46 tahun. Kondisi nampaknya diperhatikan oleh Dinas

Pendidikan, sehubungan dengan kondisi usia, kinerja dan keamanan. Nampaknya guru yang berusia di atas umur 46 tahun kebanyakan terpusat di Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Oleh karena itu diperlukan pula penataan dan pemerataan guru dari aspek usia. Namun dengan memperhatikan aspek komposisi usia, yakni yang dominan adalah guru yang berusia 33-46 tahun, baru guru yang berusia di atas 46 tahun dan yang berusia di bawah 33 tahun.

Guru SMP Negeri dan SMA Negeri kebanyakan telah sesuai antara kompetensi keilmuan dengan mata pelajaran pokok yang diajar. Terdapat beberapa guru yang berbasis Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, seperti dari Fakultas Ekonomi, Pertanian, Hukum dan Sosial Politik telah dibekali dengan ijazah Akta IV. Sementara itu ditemukan juga guru yang mengajar mata pelajaran pokok, tetapi tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya. Ketidaksesuaian demikian terjadi bisa jadi disebabkan karena kelebihan jumlah guru pada mata pelajaran tertentu atau sebaliknya karena kekurangan guru pada mata pelajaran lain, maka untuk menambah kewajiban jumlah beban mengajar, maka guru yang bersangkutan ditambah jamnya untuk mengajar mata pelajaran, atau malah guru yang bersangkutan mengajar seluruh jam wajib untuk mengajar, yakni 24 jam mengajar, maupun memenuhi jumlah jam mengajar guru per minggu. Ketidaksesuaian guru mengajar mata pelajaran tertentu dengan kompetensi keilmuan, dapat juga terjadi karena kecenderungan penguasaan jam pelajaran oleh guru senior, sehingga guru junior tidak cukup jumlah beban mengajarnya, dan

untuk menambah jumlah beban jam mengajar wajib, dia ditambah dengan mengajar mata pelajaran lain, bukan bidangnya. Sebab lain yang paling akurat adalah untuk mata pelajaran TIK, Seni Budaya dan Muatan lokal, hampir sebagian besar diajar oleh guru yang tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan, karena output guru TIK dan Seni Budaya cenderung baru dibuka di beberapa perguruan tinggi tertentu saja, misalnya hanya di STIKIP PGRI saja. Sedangkan output guru Muatan Lokal belum ada perguruan tinggi yang membuka program studi Muatan Lokal.

Namun demikian terhadap guru tidak memiliki kesesuaian antara kompetensi keilmuan dengan mata pelajaran pokok yang diajarnya, hendaknya perlu ditingkatkan kompetensi pedagogik dan profesional melalui pelatihan dan penataran keterampilan mengajar, khususnya mikro teaching baik dalam bentuk pre-service, in-service, peace corp training, pelatihan internship berbasis mata pelajaran, pelatihan guru mapel secara sistematis.

Jumlah guru SMP Negeri Kota Banjarmasin berdasarkan mata pelajaran pokok yang diajarnya, bukan mata pelajaran tambahan, maka kategori jumlah guru yang banyak adalah guru mata pelajaran IPA Terpadu, Matematika, B.Indonesia, IPS Terpadu dan B. Sementara jumlah guru kategori sedikit adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal, Seni Budaya, TIK dan Keterampilan. Sementara jumlah guru SMA Negeri terbanyak adalah guru mata pelajaran Biologi, disusul kemudian B.Inggris, Matematika, BP/BK, PKn dan B.Indonesia. Sementara kategori jumlah guru

yang sedikit adalah guru mata pelajaran TIK, Pendidikan Seni, B.Asing, dan Muatan Lokal. Jumlah guru demikian setelah ditelaah berdasarkan analisis kebutuhan, maka terdapat beberapa mata pelajaran yang gurunya menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari jumlah yang dibutuhkan sekolah.

2. Kelebihan, Kekurangan, Kebutuhan dan Tindakan untuk Guru SMPN dan SMAN Kota Banjarmasin yang Jumlahnya Kelebihan dan Kekurangan.

Penyebaran guru mata pelajaran di SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin masih belum merata dan perlu dilakukan penataan dan pemerataan. Hal demikian terlihat data adanya jumlah guru di satu sekolah dan wilayah kecamatan ada yang menunjukkan kelebihan, namun pada satu terdapat jumlah guru mata pelajaran yang mengalami kekurangan. Berdasarkan perhitungan selisih antara jumlah guru yang lebih dibandingkan dengan jumlah yang kurang, maka diperoleh kebutuhan nyata terhadap guru yang mana yang perlu diretribusi dan mana guru yang perlu penambahan.

Dari perhitungan selisih antara jumlah guru yang kelebihan dan guru yang kekurangan, maka diperoleh angka jumlah guru yang dibutuhkan SMP Negeri Kota Banjarmasin, yakni sebanyak 1107 orang, dengan urutan sesuai besaran jumlah dan prosentase, yaitu guru Matematika, 141 orang, guru IPA Terpadu, 133 orang, guru IPS Terpadu, 123 orang, guru B.Indonesia, 122 orang, guru B.Ingggris, 115 orang, guru BP/BK, 100 orang, guru Pendidikan

Agama, 66 orang, guru Mulok, 64, guru PKn, 61 orang, guru Penjasorkes, 58 orang, guru Seni Budaya, 50 orang, guru TIK, 49 orang dan guru Keterampilan, 25 orang.

Untuk guru-guru SMP Negeri mata pelajaran IPA Terpadu, B.Indonesia, IPS Terpadu, Matematika, perlu dilakukan redistribusi. Sementara para guru Penjasorkes, KTK, BP/BK, TIK, B.Ingggris, Muatan Lokal, dan Seni Budaya serta PKn hendaknya dilakukan tindakan penambahan guru atau jam pelajaran guru yang masih kurang.

Dari perhitungan selisih antara jumlah guru yang kelebihan dan guru yang kekurangan, maka diperoleh angka jumlah guru yang dibutuhkan SMA Negeri Kota Banjarmasin, yakni sebanyak 473 orang, dengan urutan sesuai besaran jumlah, yaitu guru Matematika dan BP/BK, 44 orang, guru B.Indonesia, 39 orang, guru B.Ingggris, 38 orang, guru Biologi, 30 orang, guru Kimia, 28 orang, guru Ekonomi/Akuntansi dan Fisika, 27 orang, guru Pendidikan Agama dan PKn, 23 orang, guru Sejarah dan Penjasorkes, 21 orang, guru TIK, 20 orang, guru Pendidikan Seni, 19 orang, guru Sosiologi dan Muatan Lokal, 18 orang, guru Geografi, 17 orang, guru B.Asing, 13 orang dan guru Keterampilan, 3 orang.

Untuk jumlah guru mata pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin yang menunjukkan kelebihan dan layak dilakukan tindakan redistribusi dari yang terbanyak hingga jumlah yang sedikit berturut-turut adalah guru Biologi, 19 orang, guru PKn, 18 orang, guru Ekonomi/Akuntansi dan B.Ingggris, sebanyak 12 orang, guru Sosiologi, 8 orang, guru Sejarah, 7

orang, Fisika, 6 orang, Matematika dan Kimia, 4 orang, Geografi dan Penjasorkes , 3 orang, Pendidikan Agama, 2 orang dan B.Indonesia sebanyak 1 orang.

Sementara jumlah guru mata pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin yang menunjukkan kekurangan dari jumlah yang dibutuhkan dan layak dilakukan tindakan penambahan guru atau jumlah beban mengajarnya adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal sebanyak 16 orang, guru B.Asing sebanyak 10 orang, guru TIK, 5 orang, guru Keterampilan sebanyak 3 orang dan guru BP/BK 2 orang.

Adanya fenomena jumlah guru yang mengalami kelebihan dan jumlah guru jelas menunjukkan indikasi adanya kekurangcermatan dalam melakukan penempatan guru-guru mata pelajaran di sekolah. Bisa penempatan yang dilakukan tidak melalui prosedur dan teknis penempatan guru yang sesungguhnya. Salah satu faktor guru kekurangan jam mengajar, karena ada guru yang mutasi ke sekolah tertentu tanpa melalui prosedur yang benar, padahal di sekolah tersebut, sudah cukup jumlah gurunya, bahkan ada yang berlebih. Kalau sesuai prosedur, seharusnya ada surat keterangan lolos (dari sekolah induk), dan surat keterangan butuh (dari sekolah yang dituju). Guru yang kekurangan jam mengajar bukan semata-mata kesalahan guru tetapi kesalahan pembuat kurikulum karena telah menciptakan struktur kurikulum yang timpang, dan juga kesalahan Dinas Pendidikan karena belum bisa mendistribusikan/memetakan guru.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Selama ini guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (*effective schools*) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan –baik dari sisi ekonomi maupun karier– yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Hal inilah sebenarnya yang melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antara *urban schools* dengan *rural schools*.

Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di daerah terpencil berupa kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan daya tarik yang lebih kepada mereka yang mengajar di sekolah-sekolah pinggiran tersebut, misalnya, dengan ditambahkannya insentif perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Pola pembinaan karir terutama guru-guru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.

Dalam hal ini, ada baiknya kita mengadopsi sistem pembinaan karir model militer, di mana kader-kader terbaik dan masih muda harus ditempa terlebih dahulu di daerah-daerah yang penuh tantangan yang tidak mudah (*contexts of stringency*) khususnya di sekolah yang akreditasi rendah. Jika yang bersangkutan berprestasi dipindahkan ke sekolah yang berakreditasi menengah, seterusnya ke sekolah berakreditasi tinggi.

3. Aspirasi Terhadap Kebijakan Penataan dan Restribusi Guru yang Jumlahnya Kelebihan dan Kekurangan dari Kebutuhan di SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin

Selama ini kebijakan penempatan guru pindahan ke suatu sekolah, masih belum sepenuhnya sesuai dengan aspirasi kepala sekolah. Beberapa kasus ditemukan, guru yang dipindahkan ke sekolah mereka tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, baik kompetensi keilmuan maupun dalam jumlah jam mengajar yang tersedia. Selain itu kedatangan guru pindahan, baik surat keputusan dan masuknya guru yang bersangkutan ke sekolah, kebanyakan tidak sesuai dengan kondisi akademik sekolah, sehingga kedatangan guru pindahan, malah mengganggu situasi pembelajaran, salah satunya berubahnya jadwal mengajar yang telah disusun. Jika jumlah kelas dan gurunya relatif sedikit, bukan masalah yang rumit, namun berbeda, manakala jumlah kelas dan jumlah gurunya banyak hingga 20an kelas, maka perubahan jadwal pelajaran yang disusun.

Selain itu proses penempatan dan pemindahan guru tidak melalui penentuan kriteria yang jelas tentang guru yang akan dimutasi, misalnya guru yang telah mencapai masa 5 tahun, maka yang bersangkutan siap dipindahkan ke sekolah lain. Proses mutasi guru juga belum didasarkan siklus yang reguler, dari sekolah mana dalam arti peringkat sekolah, misalnya untuk guru yang baru, maka siap ditempatkan di daerah pinggiran atau kinerja sekolah yang rendah. Jika telah melalui masa 5 tahun menunjukkan kinerja yang baik, maka ia berhak pindah ke sekolah yang

lebih maju, begitu seterusnya, sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan sekolah lain.

Berdasarkan pada penilaian terhadap belum begitu jelasnya kriteria, prosedur dan teknis mutasi (waktu penerbitan surat keputusan, waktu penempatan disekolah pindahan), maka dilahirkan beberapa butir pemikiran mengenai aspirasi terhadap penataan dan redistribusi guru yang jumlahnya mengalami kelebihan dan kekurangan di SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin, yaitu :

- a. Tindakan untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan jumlah guru di SMPN dan SMAN untuk menuju ke arah penataan dan pemerataan, maka diperlukan tindakan berupa redistribusi dan penambahan guru atau jumlah guru yang kurang.
- b. Sebelum dilakukan tindakan redistribusi dan penambahan, hendaknya dilakukan sosialisasi dalam bentuk :
 - 1) Ke sekolah-sekolah secara langsung kepada kepala sekolah dan para guru yang diindikasikan termasuk, khususnya guru yang akan terkena tindakan redistribusi. Tindakan sosialisasi juga dilakukan untuk menyerap aspirasi dari kepala sekolah dan guru yang bersangkutan.
 - 2) Mengundang para kepala sekolah dan para guru yang berindikasi terkena tindakan redistribusi dan melakukan dialog tentang tata cara teknis sebaiknya dalam melakukan redistribusi tersebut.

- c. Sebelum dilakukan teknis redistribusi guru, sebaiknya dilakukan penentuan kriteria guru yang akan direstribusi dan prosedur tata cara restrribusi.
- d. Penenturan kriteria guru yang direstribusi adalah melihat kepada usia, yakni prioritas yang berumur 34-46 tahun, masa kerja di sekolah, kesesuaian kompetensi keilmuan, melebihi jumlah beban guru jam mengajar, kinerja dan berorientasi pada peningkatan mutu pada sekolah yang akan menerima, bukan guru buangan, khususnya jika ditempatkan di sekolah pinggiran.
- e. Prosedur pemindahan guru yang termasuk kriteria redistribusi hendaknya:
 - 1) Melibatkan semua pihak yang terkait antara dinas pendidikan, kepala sekolah dan Perguruan Tinggi. Jika perlu dibentuk tim independen yang melaksanakan atau memantau, terdiri dari dinas pendidikan, K3S dan Perguruan Tinggi, agar pelaksanaan redistribusi berjalan sesuai dengan asas penataan dan pemerataan secara objektif, konsisten dan konsekuen dengan regulasi yang ada.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebelum tindakan redistribusi dan dengan melakukan konfirmasi saat dan sesudah tindakan redistribusi; agar kepala sekolah mengetahui sosok guru yang akan direstribusi atau menerima guru yang direstribusi dan menyiapkan kondisi kondusif sebaik mungkin

- 3) Dilakukan secara serentak pada masa libur sebelum awal tahun ajaran.
 - 4) Surat Keputusan penempatan guru redistribusi diberikan menjelang awal atau akhir tahun ajaran atau semester.
 - 6) Restribusi guru hendaknya diprioritaskan kepada sekolah atau wilayah yang terdekat.
- f. Perlu perubahan paradigma kerja dari para guru bahwa pemindahan ke sekolah lain, bukan sebagai tindakan penghukuman, tetapi dalam rangka penyegaran. Karena tindakan redistribusi guru bukan hanya kepada guru yang kinerjanya rendah, tetapi bisa jadi kepada guru yang kinerja baik, namun lebih kepada promosi jabatan, misalnya menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.
 - g. Perlu penataan keseragaman format data guru PNS di sekolah dan pemantauan berkala terhadap analisis kebutuhan guru yang dilakukan sekolah, jangan hanya diserahkan kepada Tata usaha sekolah.
 - h. Perlu ditetapkan siklus mutasi guru yang jelas dan terukur baik kriteria, prosedur dan teknik penataan dan restribusi.
 - i. Perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Selama ini guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (*effective schools*) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan – baik dari sisi ekonomi maupun karier– yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Hal inilah sebenarnya yang melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antara *urban schools* dengan *rural*

schools. Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di daerah terpencil berupa kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan daya tarik yang lebih kepada mereka yang mengajar di sekolah-sekolah pinggiran tersebut, misalnya, dengan ditambahkan insentif perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Pola pembinaan karir terutama guru-guru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.

- j. Dalam hal ini, ada baiknya kita mengadopsi sistem pembinaan karier model militer, di mana kader-kader terbaik harus ditempa terlebih dahulu di daerah-daerah yang penuh tantangan yang tidak mudah (*contexts of stringency*).
- k. Oleh karena itu demi program pemerataan kualitas sekolah, maka seluruh guru di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten harus menandatangani kesediaan untuk bersedia dipindahkan lain atas dasar siklus, kriteria, prosedur dan teknik mutasi yang jelas, terukur, konsisten dengan regulasi yang telah ke sekolah lain. Program ini untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin agar merata. Sehingga tidak ada sekolah yang kualitasnya sangat menonjol karena guru yang berkualitas menumpuk di sekolah tersebut. Sementara di sisi lain masih ada sekolah yang jauh tertinggal secara kualitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Guru SMP Negeri dan SMA Negeri di Kota Banjarmasin ternyata lebih banyak perempuan daripada guru lelaki, dan sama-sama berad di kecamatan Banjarmasin Utara. Jika guru lelaki SMP Negeri lebih banyak di Kecamatan Banjarmasin Tengah, maka guru SMA Negeri lebih banyak di Banjar Selatan. Komposisi jumlah guru dari aspek gender telah menunjukkan kurang meratanya penyebaran guru, khususnya salah satu jenis kelamin guru yang lebih banyak terpusat pada satu kecamatan tertentu.
2. Guru SMP Negeri maupun SMA Negeri kebanyakan telah memenuhi persyaratan kompetensi akademik, yakni telah berijazah S1, bahkan sebagian telah ada yang mencapai S2 bahkan S3. Namun demikian ternyata di antara guru SMP Negeri dan SMA Negeri masih terdapat para guru yang masih berpendidikan Sarjana Muda, bahkan berpendidikan Diploma. Artinya masih terdapat guru yang mengajar belum sesuai dengan kompetensi akademik yang dipersyaratkan.
3. Guru SMP Negeri dan SMA Negeri kebanyakan telah mampu mencapai golongan IV, namun sedikit sekali yang mencapai IVb, terutama IVc, Bahkan dapat dikatakan guru golongan IVa ini menunjukkan mayoritas di seluruh SMP Negeri dan SMA Negeri. Hal demikian terdapat kecenderungan adanya bahwa kebanyakan guru di SMP Negeri dan SMA Negeri adalah berada di golongan IVa dan berusia di atas lebih dari 46

tahun. Kondisi ini nampaknya diperhatikan oleh Dinas Pendidikan, sehubungan dengan kondisi usia, kinerja dan keamanan.

4. Guru SMP Negeri dan SMA Negeri kebanyakan telah sesuai antara kompetensi keilmuan dengan mata pelajaran pokok yang diajar. Sementara itu ditemukan juga guru yang mengajar mata pelajaran pokok, tetapi tidak sesuai dengan kompetensi keilmuannya, karena kelebihan jumlah guru pada mata pelajaran tertentu; kekurangan guru pada mata pelajaran lain, untuk menambah kewajiban jumlah beban mengajar, maka guru yang bersangkutan ditambah jamnya untuk mengajar mata pelajaran, kecenderungan penguasaan jam pelajaran oleh guru senior, sehingga guru junior tidak cukup jumlah beban mengajarnya, dan untuk menambah jumlah beban jam mengajar wajib, dia ditambah dengan mengajar mata pelajaran lain, bukan bidangnya, mata pelajaran TIK, Seni Budaya dan Muatan lokal, hampir sebagian besar diajar oleh guru yang tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan, karena output guru TIK dan Seni Budaya cenderung baru dibuka di beberapa perguruan tinggi tertentu saja, misalnya hanya di STIKIP PGRI saja. Sedangkan output guru Muatan Lokal belum ada perguruan tinggi yang membuka program studi Muatan Lokal.
5. Jumlah guru SMP Negeri Kota Banjarmasin berdasarkan mata pelajaran pokok yang diasuhnya, maka jumlah guru yang banyak adalah guru mata pelajaran IPA Terpadu, Matematika, B.Indonesia, IPS Terpadu dan B. Sementara jumlah guru kategori sedikit adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal, Seni Budaya, TIK dan Keterampilan. Sementara jumlah guru SMA

Negeri terbanyak adalah guru mata pelajaran Biologi, disusul kemudian B.Inggris, Matematika, BP/BK, PKn dan B.Indonesia. Kategori jumlah guru yang sedikit adalah guru mata pelajaran TIK, Pendidikan Seni, B.Asing, dan Muatan Lokal.

6. Dari perhitungan selisih antara jumlah guru yang kelebihan dan guru yang kekurangan, maka diperoleh angka jumlah guru yang dibutuhkan SMP Negeri Kota Banjarmasin, yakni sebanyak 1107 orang, dengan urutan sesuai besaran jumlah dan prosentase, yaitu guru Matematika, 141 orang, guru IPA Terpadu, 133 orang, guru IPS Terpadu, 123 orang, guru B.Indonesia, 122 orang, guru B.Inggris, 115 orang, guru BP/BK, 100 orang, guru Pendidikan Agama, 66 orang, guru Mulok, 64, guru PKn, 61 orang, guru Penjasorkes, 58 orang, guru Seni Budaya, 50 orang, guru TIK, 49 orang dan guru Keterampilan, 25 orang.
7. Guru-guru SMP Negeri mata pelajaran IPA Terpadu, B.Indonesia, IPS Terpadu, Matematika, perlu dilakukan redistribusi. Sementara para guru Penjasorkes, KTK, BP/BK, TIK, B.Inggris, Muatan Lokal, dan Seni Budaya serta PKn hendaknya dilakukan tindakan penambahan guru atau jam pelajaran guru yang masih kurang.
8. Dari perhitungan selisih antara jumlah guru yang kelebihan dan guru yang kekurangan, maka diperoleh angka jumlah guru yang dibutuhkan SMA Negeri Kota Banjarmasin, yakni sebanyak 473 orang, dengan urutan sesuai besaran jumlah, yaitu guru Matematika dan BP/BK, 44 orang, guru B.Indonesia, 39 orang, guru B.Inggris, 38 orang, guru Biologi, 30 orang,

guru Kimia, 28 orang, guru Ekonomi/Akuntansi dan Fisika, 27 orang, guru Pendidikan Agama dan PKn, 23 orang, guru Sejarah dan Penjasorkes, 21 orang, guru TIK, 20 orang, guru Pendidikan Seni, 19 orang, guru Sosiologi dan Muatan Lokal, 18 orang, guru Geografi, 17 orang, guru B.Asing, 13 orang dan guru Keterampilan, 3 orang.

9. Jumlah guru mata pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin yang menunjukkan kelebihan dan layak dilakukan tindakan redistribusi dari yang terbanyak hingga jumlah yang sedikit berturut-turut adalah guru Biologi, 19 orang, guru PKn, 18 orang, guru Ekonomi/Akuntansi dan B.Inggris, sebanyak 12 orang, guru Sosiologi, 8 orang, guru Sejarah, 7 orang, Fisika, 6 orang, Matematika dan Kimia, 4 orang, Geografi dan Penjasorkes , 3 orang, Pendidikan Agama, 2 orang dan B.Indonesia sebanyak 1 orang.
10. Jumlah guru mata pelajaran SMA Negeri Kota Banjarmasin yang menunjukkan kekurangan dari jumlah yang dibutuhkan dan layak dilakukan tindakan penambahan guru atau jumlah beban mengajarnya adalah guru mata pelajaran Muatan Lokal sebanyak 16 orang, guru B.Asing sebanyak 10 orang, guru TIK, 5 orang, guru Keterampilan sebanyak 3 orang dan guru BP/BK 2 orang.
11. Siklus, kriteria, prosedur dan teknis mutasi maupun dalam kerangka penataan dan redistribusi jumlah guru yang kelebihan dan kekurangan dari jumlah yang dibutuhkan di SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin masih dipandang belum terukur, konsisten dan konsekuen berdasarkan regulasi yang telah ada.

B. Rekomendasi Kebijakan

1. Komposisi jumlah guru dari aspek gender telah menunjukkan kurang meratanya penyebaran guru, khususnya salah satu jenis kelamin guru yang lebih banyak terpusat pada satu kecamatan tertentu. Diperlukan penataan dan pemerataan komposisi guru mata pelajaran yang seimbang dari aspek gender, dan umur,
2. Guru tidak memiliki kesesuaian antara kompetensi keilmuan dengan mata pelajaran pokok yang diajarnya, hendaknya perlu ditingkatkan kompetensi pedagogik dan profesional melalui pelatihan dan penataran keterampilan mengajar, khususnya mikro teaching baik dalam bentuk pre-service, in-service, peace corp training, pelatihan internship berbasis mata pelajaran, pelatihan guru mapel secara sistematis.
3. Untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru Seni Budaya, TIK, Muatan Lokal, Bahasa Asing dan Keterampilan, diperlukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk secepatnya membuka program studi yang menghasilkan guru yang dibutuhkan sekolah.
4. Aspirasi terhadap penataan dan redistribusi guru yang jumlahnya mengalami kelebihan dan kekurangan di SMP Negeri dan SMA Negeri Kota Banjarmasin, yaitu :
 - a. Tindakan untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan jumlah guru di SMPN dan SMAN untuk menuju ke arah penataan dan pemerataan, maka diperlukan tindakan berupa redistribusi dan penambahan guru atau jumlah guru yang kurang.

- b. Sebelum dilakukan tindakan redistribusi dan penambahan, hendaknya dilakukan sosialisasi dalam bentuk :
- 1) Ke sekolah-sekolah secara langsung kepada kepala sekolah dan para guru yang diindikasikan termasuk, khususnya guru yang akan terkena tindakan redistribusi. Tindakan sosialisasi juga dilakukan untuk menyerap aspirasi dari kepala sekolah dan guru yang bersangkutan.
 - 2) Mengundang para kepala sekolah dan para guru yang berindikasi terkena tindakan redistribusi dan melakukan dialog tentang tata cara teknis sebaiknya dalam melakukan redistribusi tersebut.
- c. Sebelum dilakukan teknis redistribusi guru, sebaiknya dilakukan penentuan kriteria guru yang akan direstribusi dan prosedur tata cara restribusi.
- d. Penenturan kriteria guru yang direstribusi adalah melihat kepada usia, yakni prioritas yang berumur 34-46 tahun, masa kerja di sekolah, kesesuaian kompetensi keilmuan, melebihi jumlah beban guru jam mengajar, kinerja dan berorientasi pada peningkatan mutu pada sekolah yang akan menerima, bukan guru buangan, khususnya jika ditempatkan di sekolah pinggiran.
- e. Prosedur pemindahan guru yang termasuk kriteria redistribusi hendaknya:
- 1) Melibatkan semua pihak yang terkait antara dinas pendidikan, kepala sekolah dan Perguruan Tinggi. Jika perlu dibentuk tim

independen yang melaksanakan atau memantau, terdiri dari dinas pendidikan, K3S dan Perguruan Tinggi, agar pelaksanaan redistribusi berjalan sesuai dengan asas penataan dan pemerataan secara objektif, konsisten dan konsekuen dengan regulasi yang ada.

- 2) Melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebelum tindakan redistribusi dan dengan melakukan konfirmasi saat dan sesudah tindakan redistribusi; agar kepala sekolah mengetahui sosok guru yang akan diredistribusi atau menerima guru yang diredistribusi dan menyiapkan kondisi kondusif sebaik mungkin
 - 3) Dilakukan secara serentak pada masa libur sebelum awal tahun ajaran.
 - 4) Surat Keputusan penempatan guru redistribusi diberikan menjelang awal atau akhir tahun ajaran atau semester.
- 1) Restribusi guru hendaknya diprioritaskan kepada sekolah atau wilayah yang terdekat.
- f. Perlu perubahan paradigma kerja dari para guru bahwa pemindahan ke sekolah lain, bukan sebagai tindakan penghukuman, tetapi dalam rangka penyegaran. Karena tindakan redistribusi guru bukan hanya kepada guru yang kinerjanya rendah, tetapi bisa jadi kepada guru yang kinerja baik, namun lebih kepada promosi jabatan, misalnya menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.

- g. Perlu penataan keseragaman format data guru PNS di sekolah dan pemantauan berkala terhadap analisis kebutuhan guru yang dilakukan sekolah, jangan hanya diserahkan kepada Tata usaha sekolah.
- h. Perlu ditetapkan siklus mutasi guru yang jelas dan terukur baik kriteria, prosedur dan teknik penataan dan redistribusi.
- i. Perlunya kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Selama ini guru-guru berkualitas banyak tersebar di sekolah-sekolah favorit (*effective schools*) di perkotaan. Hal ini wajar karena mereka melihat jaminan – baik dari sisi ekonomi maupun karier– yang lebih menjanjikan di sekolah-sekolah itu. Hal inilah sebenarnya yang melahirkan kesenjangan kualitas pendidikan antara *urban schools* dengan *rural schools*. Karena itu, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang menguntungkan sekolah-sekolah di daerah terpencil berupa kebijakan persebaran guru-guru berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan daya tarik yang lebih kepada mereka yang mengajar di sekolah-sekolah pinggiran tersebut, misalnya, dengan ditambahkannya insentif perumahan dan fasilitas pendukung lainnya. Pola pembinaan karir terutama guru-guru PNS bisa diarahkan pada kebijakan ini.
- j. Dalam hal ini, ada baiknya kita mengadopsi sistem pembinaan karir model militer, di mana kader-kader terbaik harus ditempa terlebih dahulu di daerah-daerah yang penuh tantangan yang tidak mudah (*contexts of stringency*).

k. Oleh karena itu demi program pemerataan kualitas sekolah, maka seluruh guru di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten harus menandatangani kesediaan untuk bersedia dipindahkan lain atas dasar siklus, kriteria, prosedur dan teknik mutasi yang jelas, terukur, konsisten dengan regulasi yang telah ke sekolah lain. Program ini untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota Banjarmasin agar merata. Sehingga tidak ada sekolah yang kualitasnya sangat menonjol karena guru yang berkualitas menumpuk di sekolah tersebut. Sementara di sisi lain masih ada sekolah yang jauh tertinggal secara kualitas.

KEPUSTAKAAN

- Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. (2008). *Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru*. Jakarta. Depdiknas.
- Faqih, Abdullah. (2007). *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Online) <http://abdullahfaqih.multiply.com/journal>. diakses tanggal 1 Mei 2012.
- Kedaulatan Rakyat, 1 Agustus 2006
- Mulyasa, (2008) *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Rosdakarya.
- Nuh, Muhammad. (2011). *Rembuk Nasional Pendidikan*. Pusdiklat Kemdiknas BojongSari Depok.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007.tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Reece, Ian and Walker, Stephen. (1997). *Teaching, Training and Learning : A Practical Guide*. New College Durham : Business Education Publisher Limited.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Yusuf, Maulana. (2011). *Hubungan antara Kompetensi Pedagogik Guru SD dengan Kualitas Pembelajaran*. Jakarta: UMHAMKA.